



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2018

TANGGAL 6 JUNI 2018

PETA RENCANA POLA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

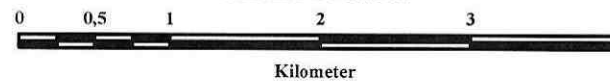


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1 : 50.000



PUSAT PEMERINTAH

- Ibukota Provinsi
- ⊙ Ibukota Kabupaten/Kota

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- Batas Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

PERAIRAN

- ~ Sungai
- ~ Waduk/Danau

JARINGAN JALAN

- Jalan Bebas Hambatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2

KAWASAN LINDUNG

- L1 : Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Hutan Lindung)
- L1 : Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Resapan Air)
- L2 : Kawasan perlindungan setempat
- L3 : Kawasan konservasi
- L4 : Kawasan lindung geologi
- L5 : Kawasan lindung lainnya (Plasma Nutfah)
- L5 : Kawasan lindung lainnya (Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan)

KAWASAN BUDIDAYA

- B1 : Zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi, kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi, dan bangunan gedung dengan intensitas tinggi
- B1 : Kawasan Stasiun Kereta Cepat
- B2 : Zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan sedang, dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana sedang
- B3 : Zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah
- B4 : Zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan mempunyai kesesuaian lingkungan untuk budidaya pertanian
- B5 : Zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, mempunyai kesesuaian lingkungan untuk budidaya pertanian dan mempunyai jaringan irigasi
- B6 : Zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan rendah serta mempunyai kesesuaian lingkungan untuk hutan produksi

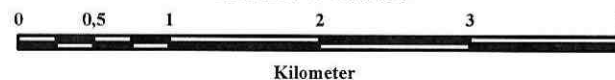


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1 : 50.000



PUSAT PEMERINTAH

- Ibukota Provinsi
- ⊙ Ibukota Kabupaten/Kota

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

PERAIRAN

- ~ Sungai
- ~ Waduk/Danau

JARINGAN JALAN

- Jalan Bebas Hambatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2

KAWASAN LINDUNG

- L1** Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya:
 - Kawasan hutan lindung
- L1** Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya:
 - Kawasan resapan air
- L2** Kawasan perlindungan setempat:
 - Sempadan sungai
 - Kawasan sekitar waduk, situ, atau kolam retensi
 - RTH kota
- L3** Kawasan konservasi:
 - Cagar alam [CA]
 - Taman hutan raya [Tahura]
 - Taman wisata alam [TWA]
 - Taman buru [TB]
- L4** Kawasan lindung geologi:
 - Cagar alam geologi
 - Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
- L5** Kawasan lindung lainnya:
 - Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
- L5** Kawasan lindung lainnya:
 - Plasma Nutfah

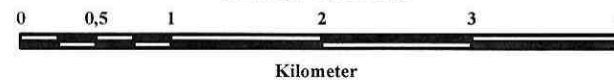


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1 : 50.000



KAWASAN BUDIDAYA

- | | |
|--|--|
| <p>B1</p> <ul style="list-style-type: none">- Kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi;- Kawasan peruntukan pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota/kecamatan;- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;- Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;- Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;- Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal;- Kawasan peruntukan industri;- Kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;- Kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;- Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;- Kawasan peruntukan pariwisata; dan- Kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya. <p>B1</p> <ul style="list-style-type: none">- Kawasan sekitar stasiun kereta cepat <p>B2</p> <ul style="list-style-type: none">- Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang;- Kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan;- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional;- Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;- Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;- Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal;- Kawasan peruntukan industri;- Kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;- Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;- Kawasan peruntukan pariwisata; dan- Kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya. | <p>B3</p> <ul style="list-style-type: none">- Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah;- Kawasan peruntukan pemerintahan kecamatan;- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan lokal;- Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala lokal;- Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala lokal;- Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;- Kawasan peruntukan pariwisata; dan- Kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya. <p>B4</p> <ul style="list-style-type: none">- Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah;- Kawasan peruntukan pariwisata berbasis alam;- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;- Kawasan peruntukan hortikultura;- Kawasan peruntukan perkebunan;- Kawasan peruntukan peternakan;- Kawasan peruntukan industri agro; dan- Kawasan peruntukan pendidikan tinggi berbasis riset. <p>B5</p> <ul style="list-style-type: none">- Kawasan peruntukan pertanian beririgasi <p>B6</p> <ul style="list-style-type: none">- Kawasan peruntukan hutan produksi tetap [HP]; dan- Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas [HPT] |
|--|--|



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Tahun 2005 Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (Update Citra SPOT 6 Tahun 2013-2015)
- Keputusan Menteri Kehutanan nomor 195/Kpts-II/2003 : Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Jawa Barat dengan perubahan kawasan hutan parsial dan tata batas kawasan hutan
- Hasil Analisis, 2017



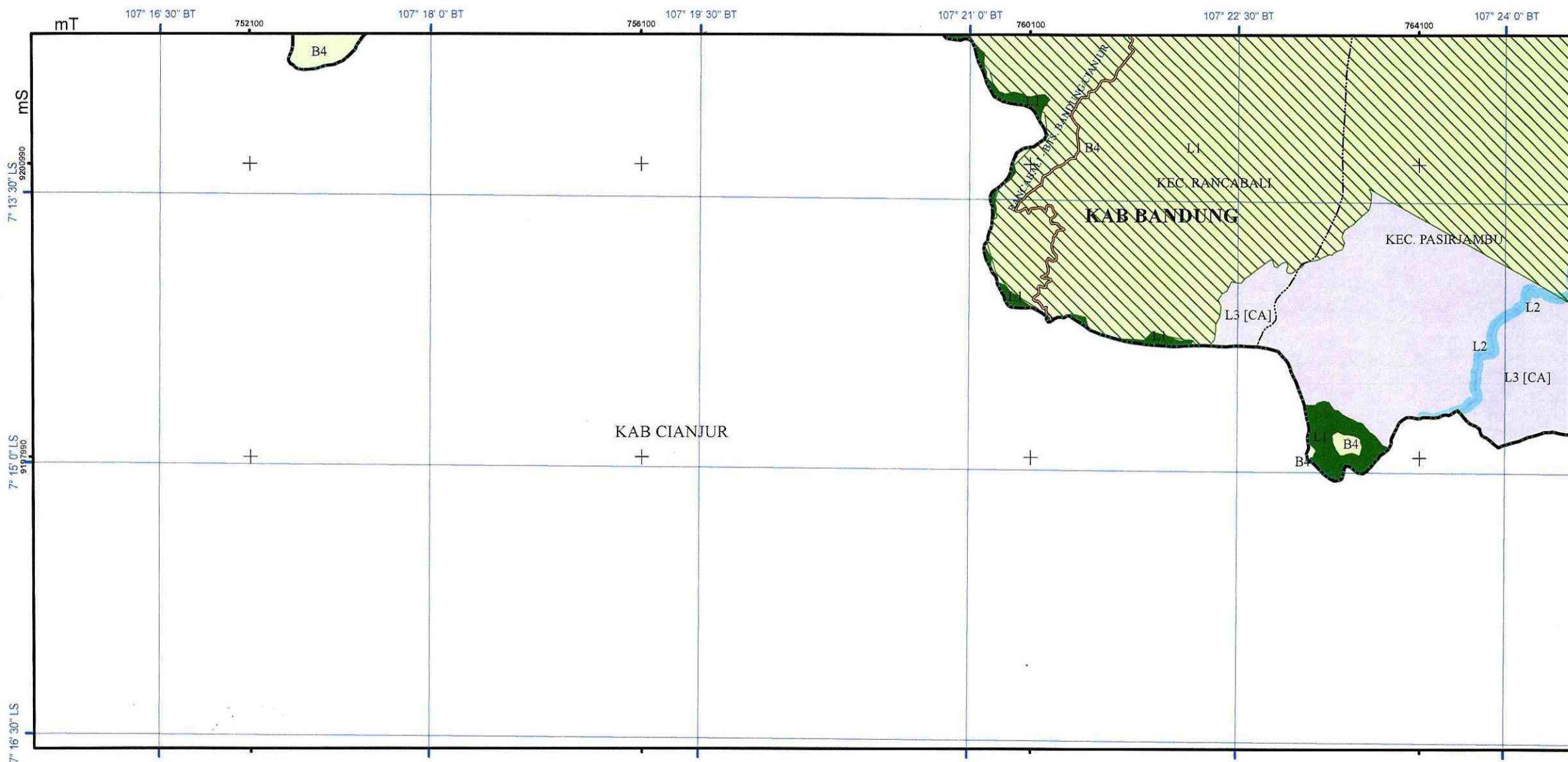
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDEKS PETA

	II - 69 - 3 - 22 - 4	II - 69 - 3 - 23 - 3	II - 69 - 3 - 23 - 4		
	II - 69 - 3 - 22 - 2	II - 69 - 3 - 23 - 1	II - 69 - 3 - 23 - 2	II - 69 - 3 - 24 - 1	
	II - 69 - 3 - 17 - 4	II - 69 - 3 - 18 - 3	II - 69 - 3 - 18 - 4	II - 69 - 3 - 19 - 3	II - 69 - 3 - 19 - 4
II - 69 - 3 - 17 - 1	II - 69 - 3 - 17 - 2	II - 69 - 3 - 18 - 1	II - 69 - 3 - 18 - 2	II - 69 - 3 - 19 - 1	II - 69 - 3 - 19 - 2
II - 69 - 3 - 12 - 3	II - 69 - 3 - 12 - 4	II - 69 - 3 - 13 - 3	II - 69 - 3 - 13 - 4	II - 69 - 3 - 14 - 3	II - 69 - 3 - 14 - 4
II - 69 - 3 - 12 - 1	II - 69 - 3 - 12 - 2	II - 69 - 3 - 13 - 1	II - 69 - 3 - 13 - 2	II - 69 - 3 - 14 - 1	II - 69 - 3 - 14 - 2
	II - 69 - 3 - 07 - 4	II - 69 - 3 - 08 - 3	II - 69 - 3 - 08 - 4	II - 69 - 3 - 09 - 3	II - 69 - 3 - 09 - 4
II - 69 - 3 - 07 - 1	II - 69 - 3 - 07 - 2	II - 69 - 3 - 08 - 1	II - 69 - 3 - 08 - 2	II - 69 - 3 - 09 - 1	
	II - 69 - 3 - 02 - 4	II - 69 - 3 - 03 - 3	II - 69 - 3 - 03 - 4	II - 69 - 3 - 04 - 3	
		II - 69 - 3 - 03 - 1	II - 69 - 3 - 04 - 2		

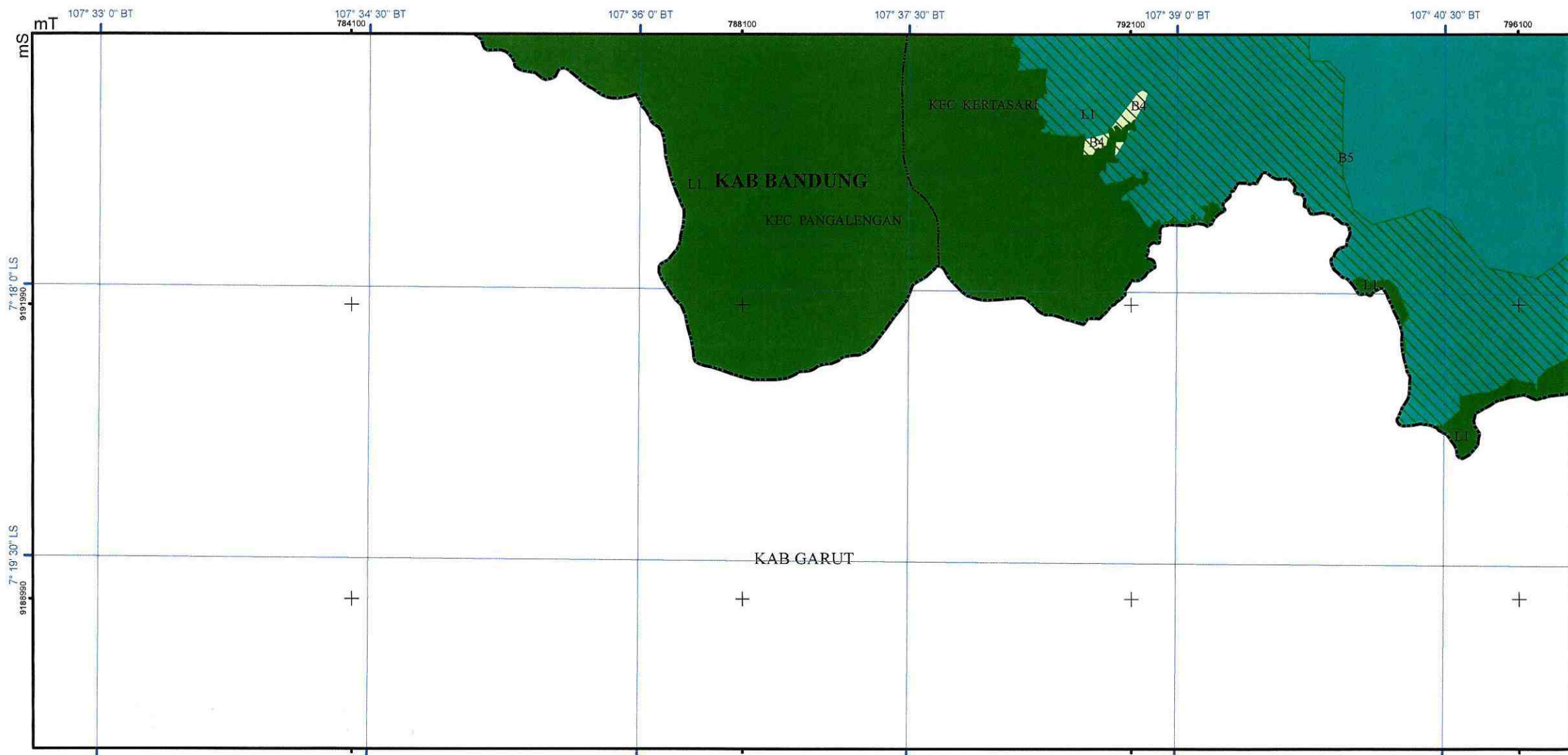


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 02 - 4



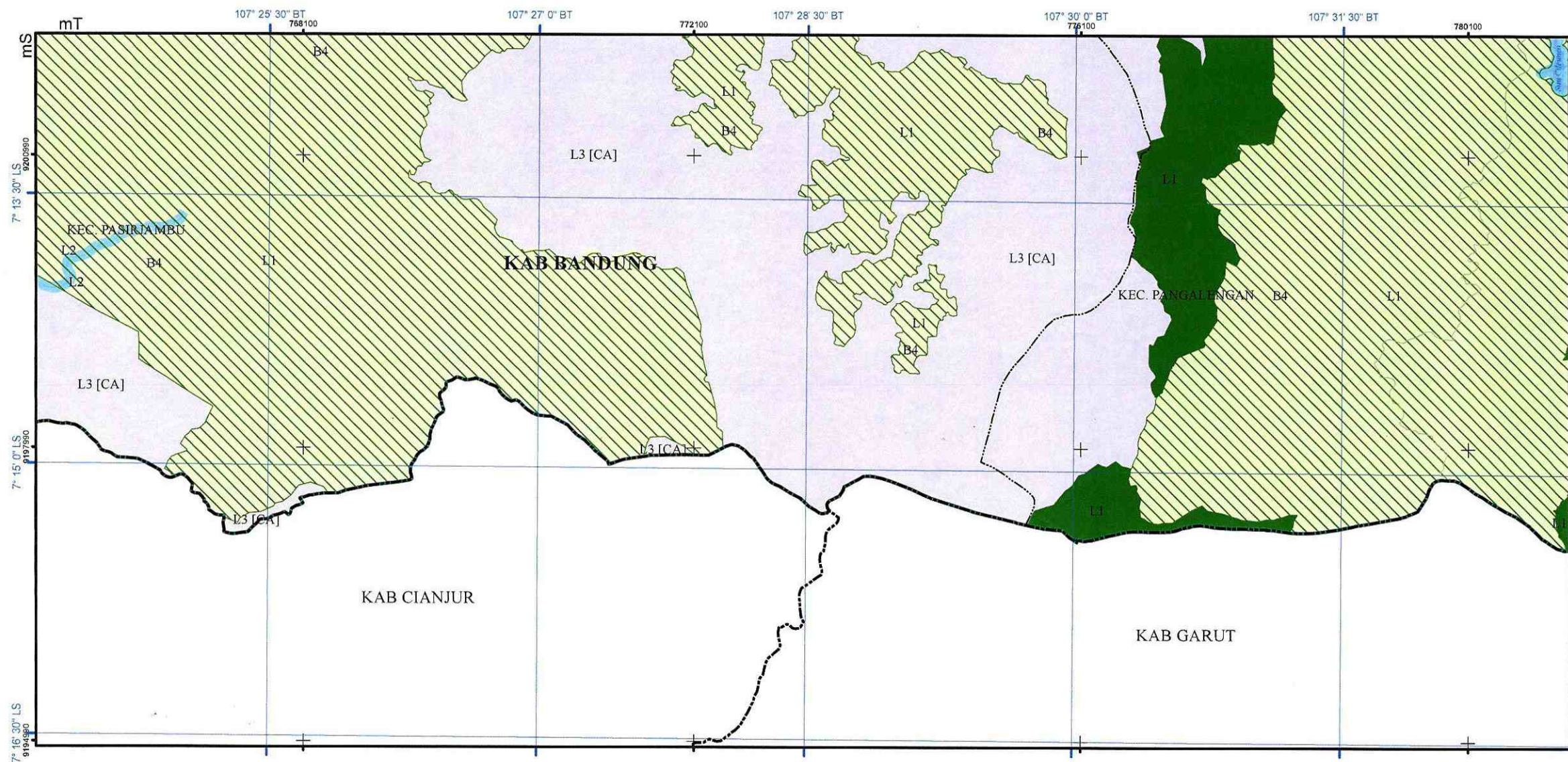


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 03 - 1



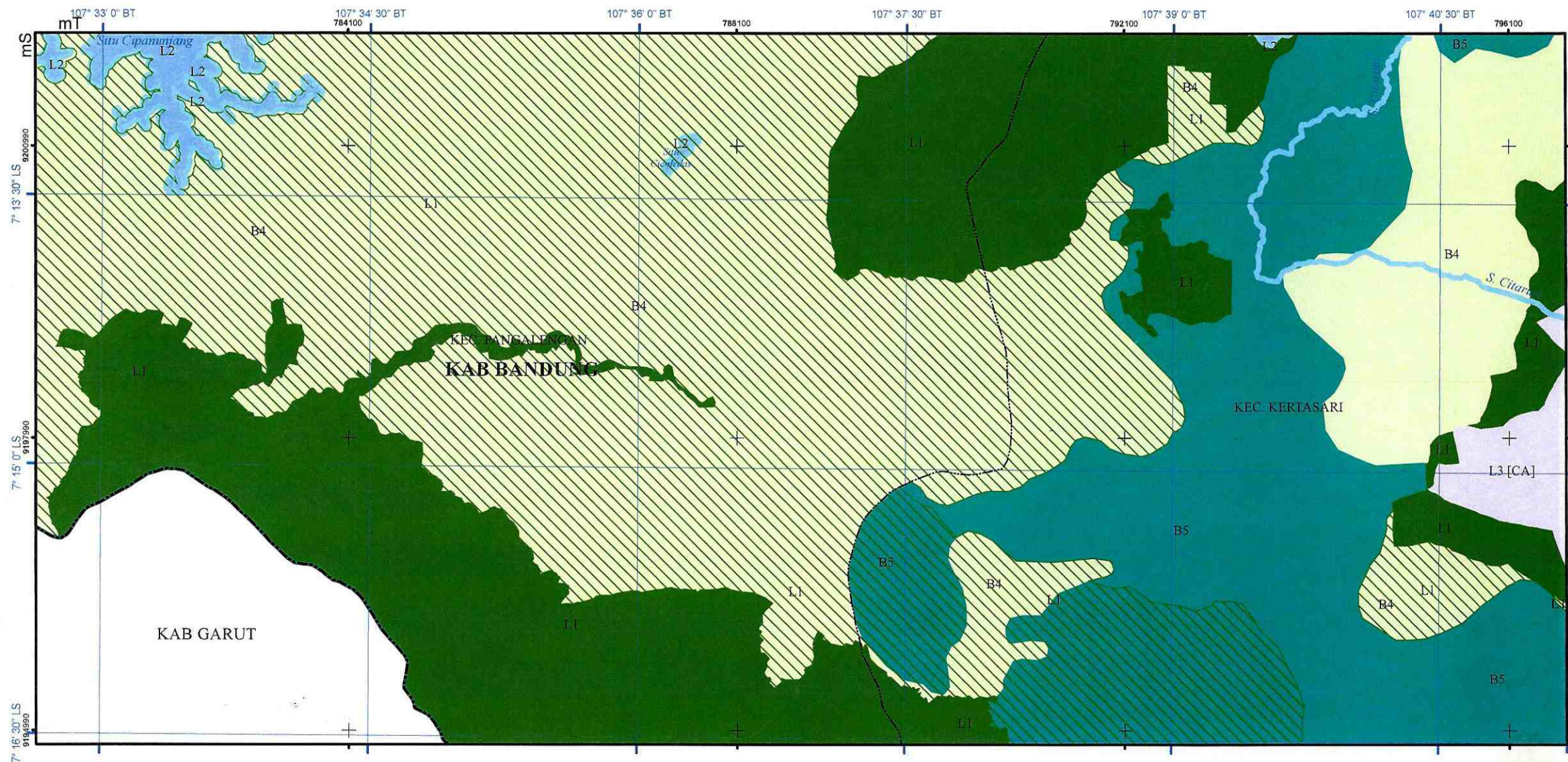


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 03 - 3



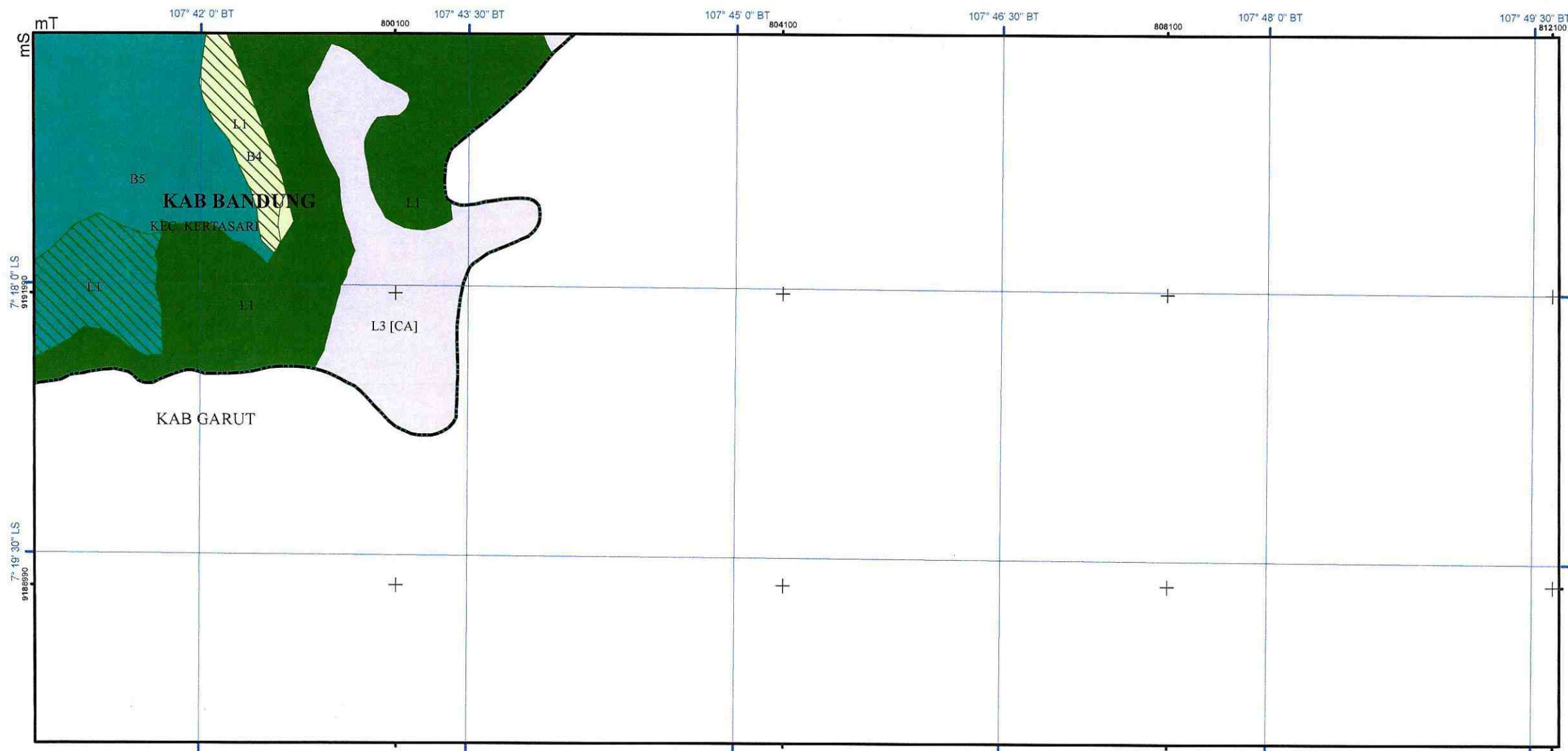


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 03 - 4



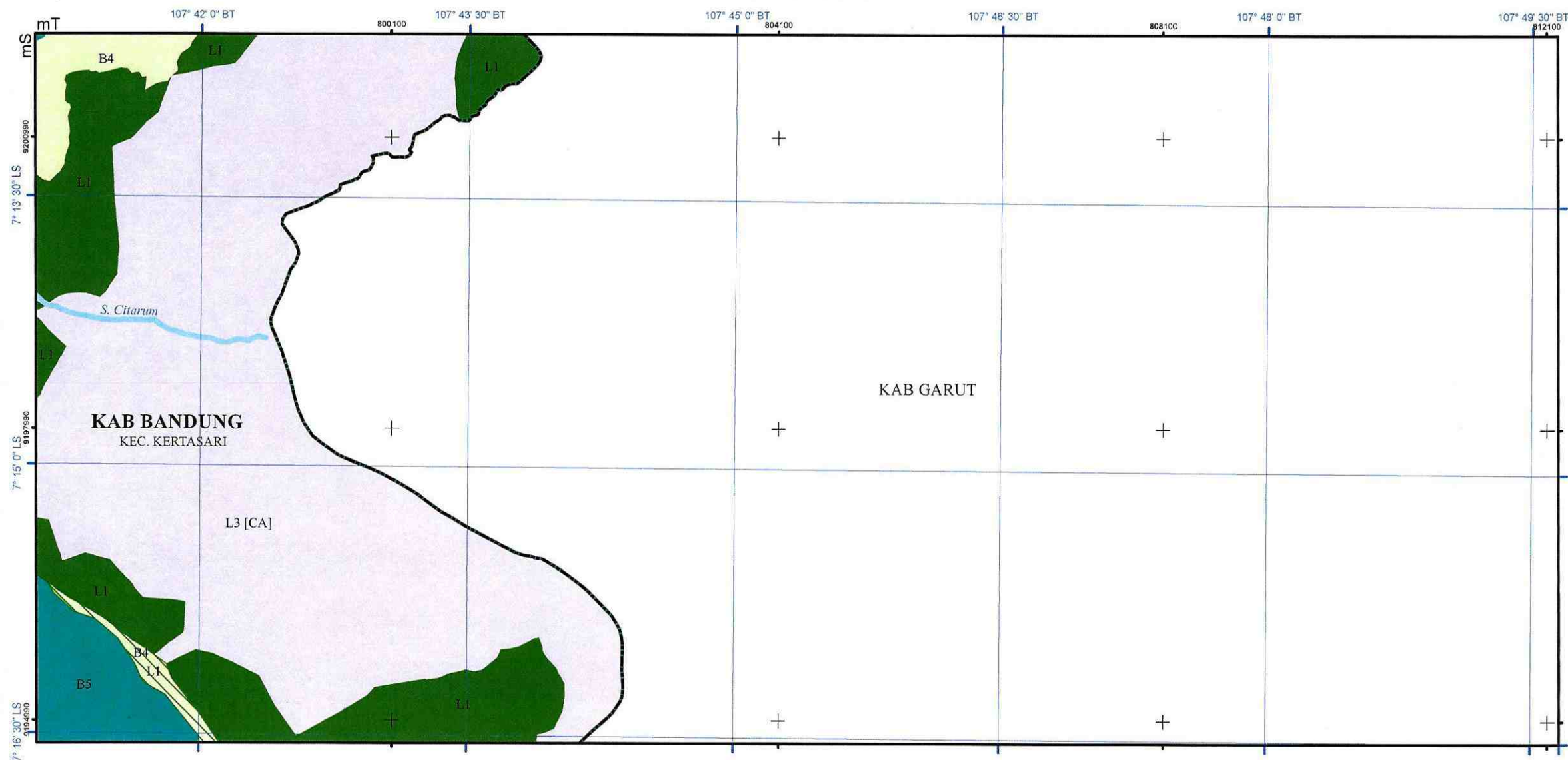


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 04 - 2



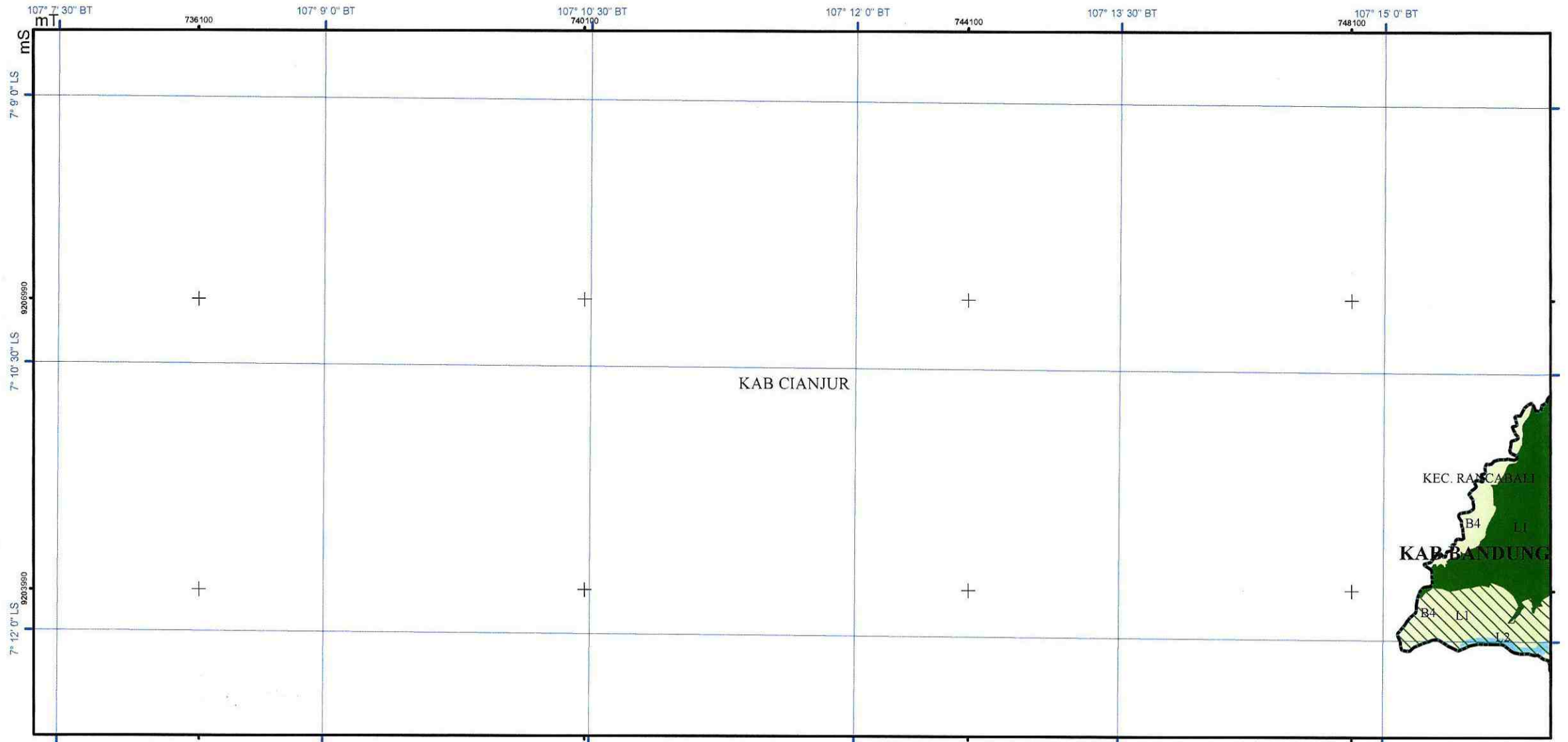


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 04 - 3



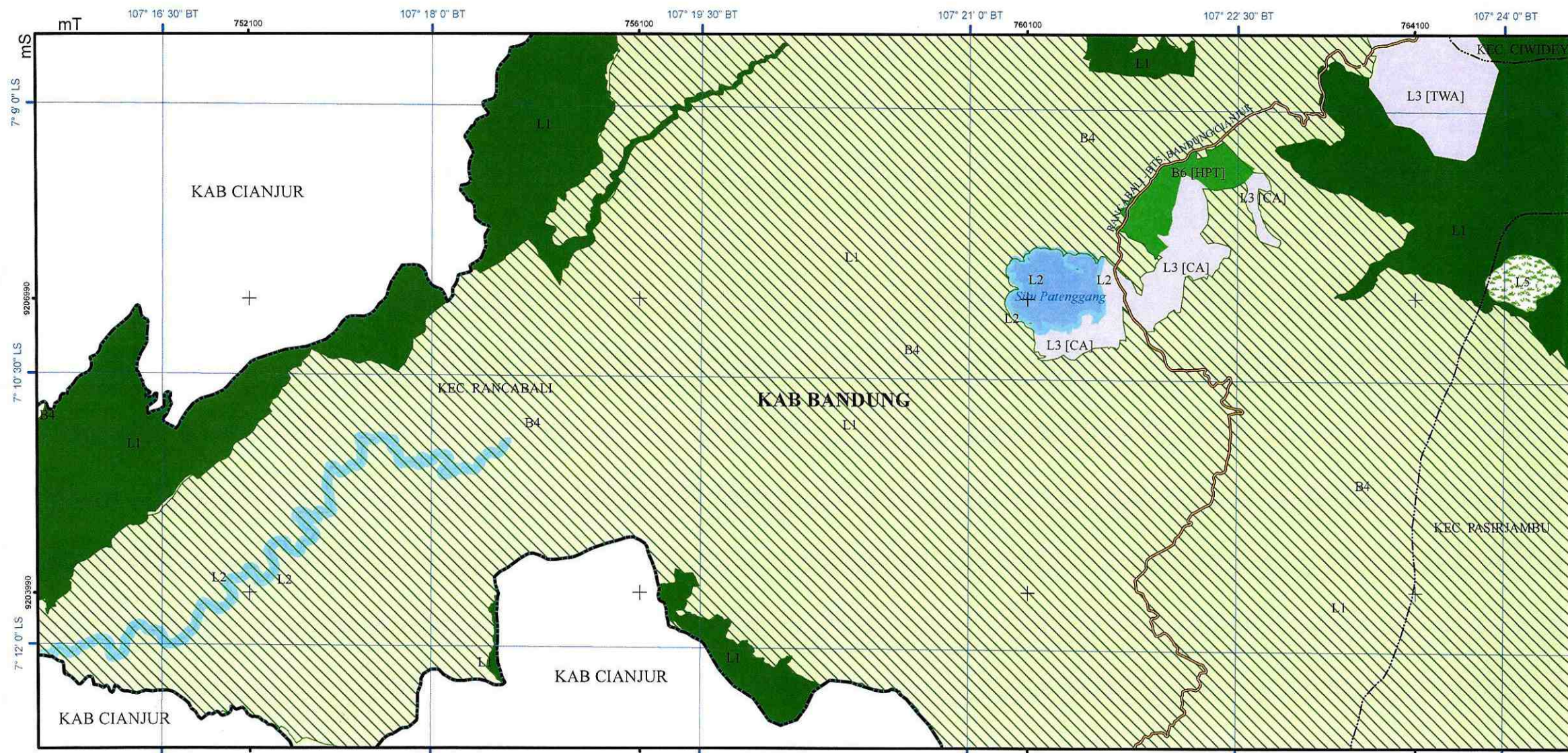


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 07 - 1



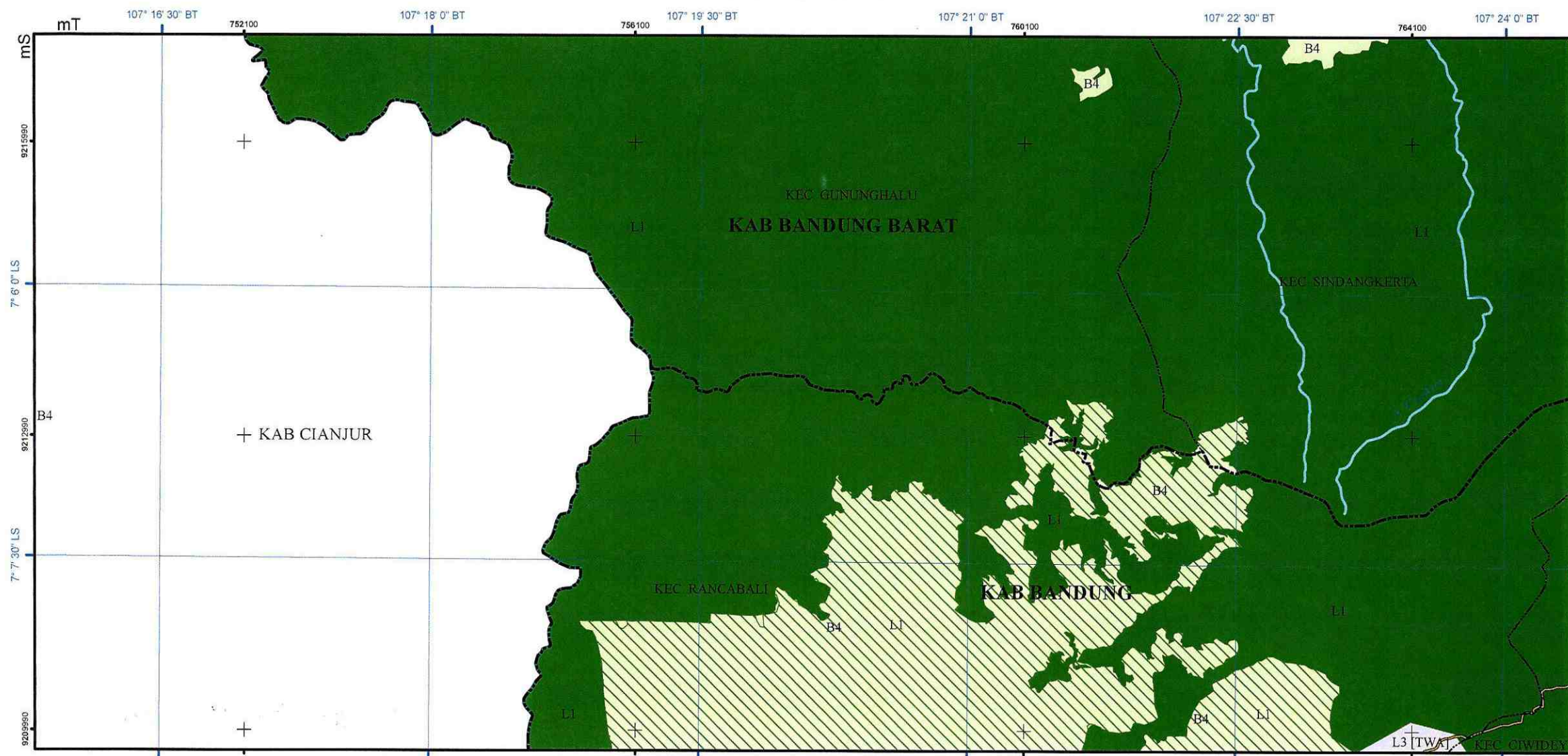


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 07 - 2



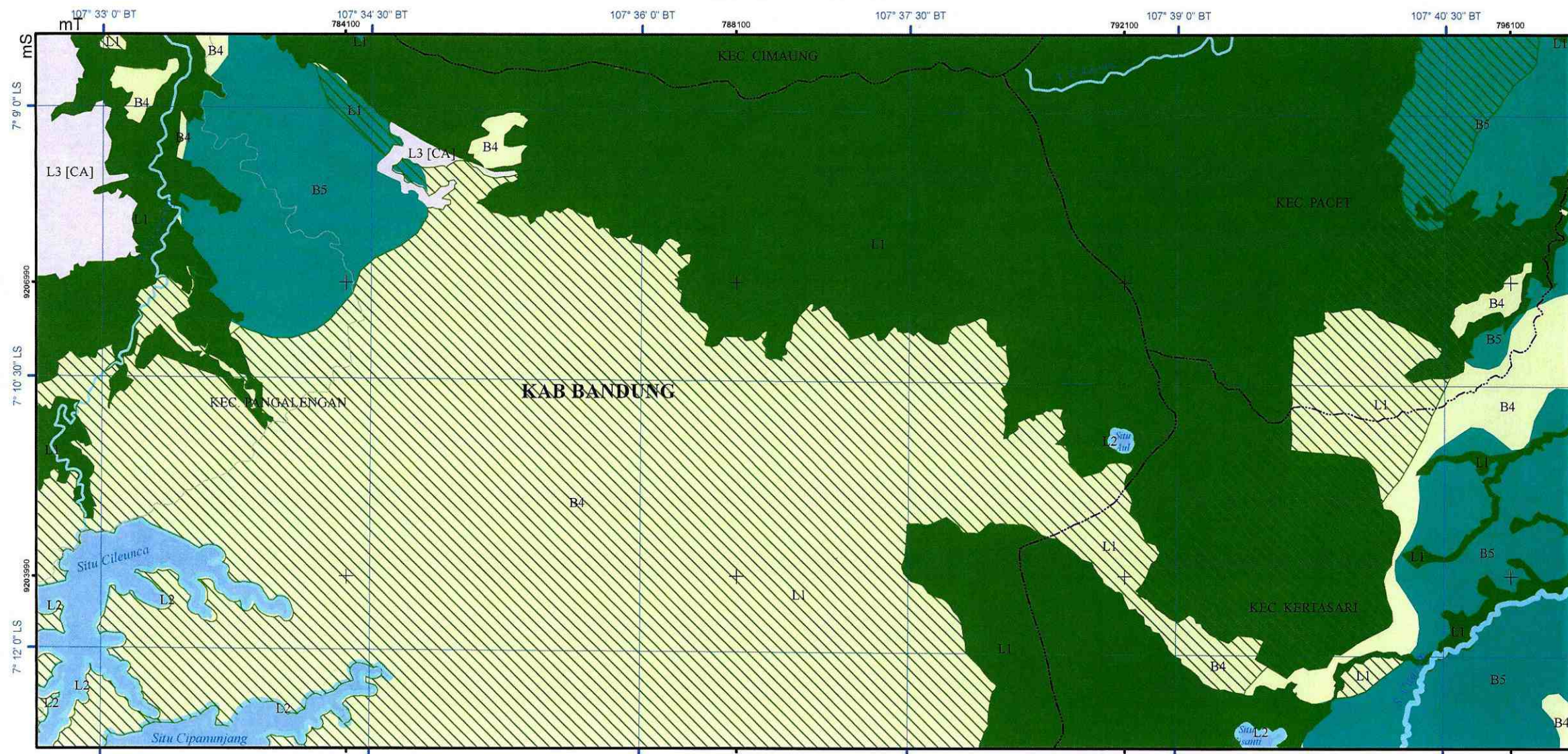


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 07 - 4



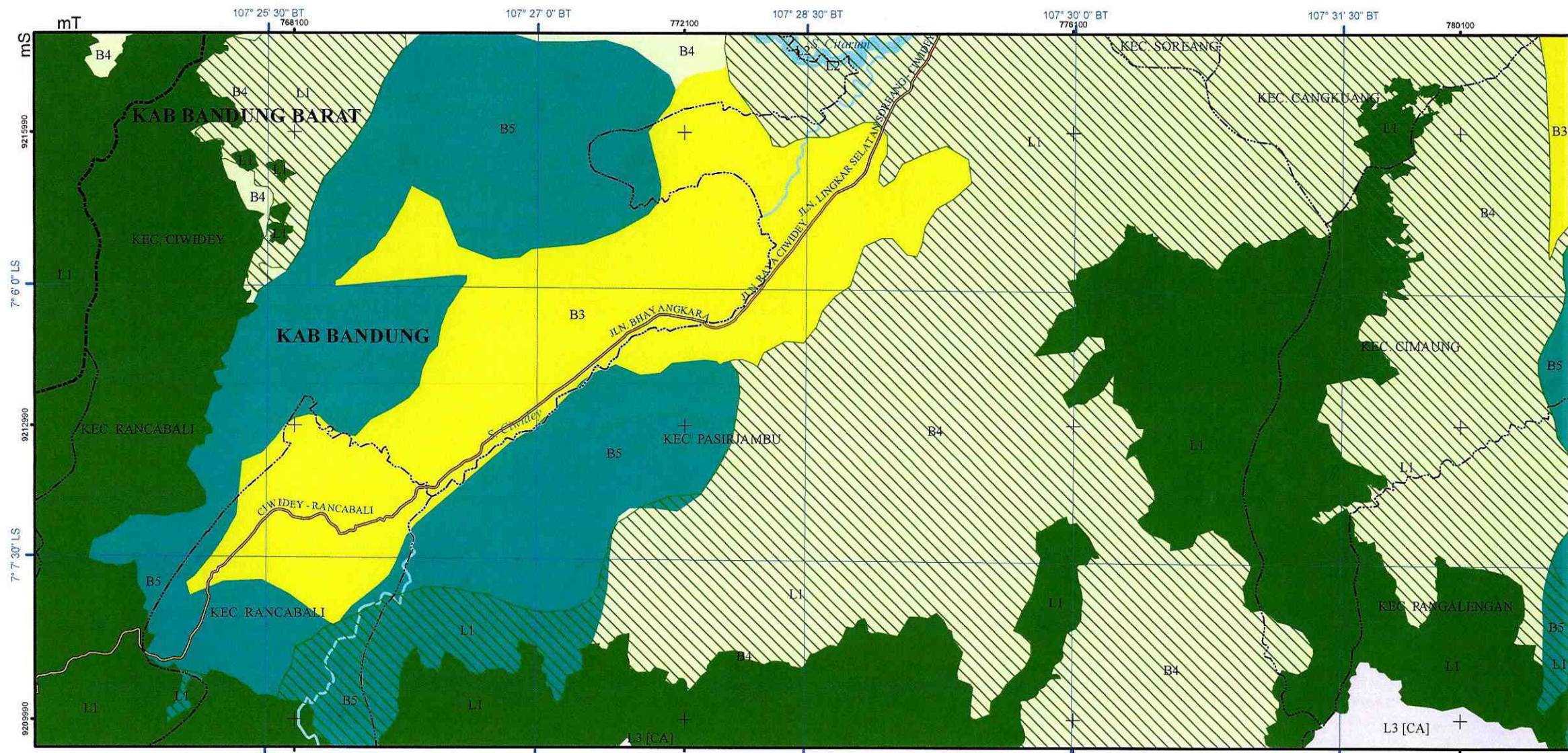


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 08 - 2



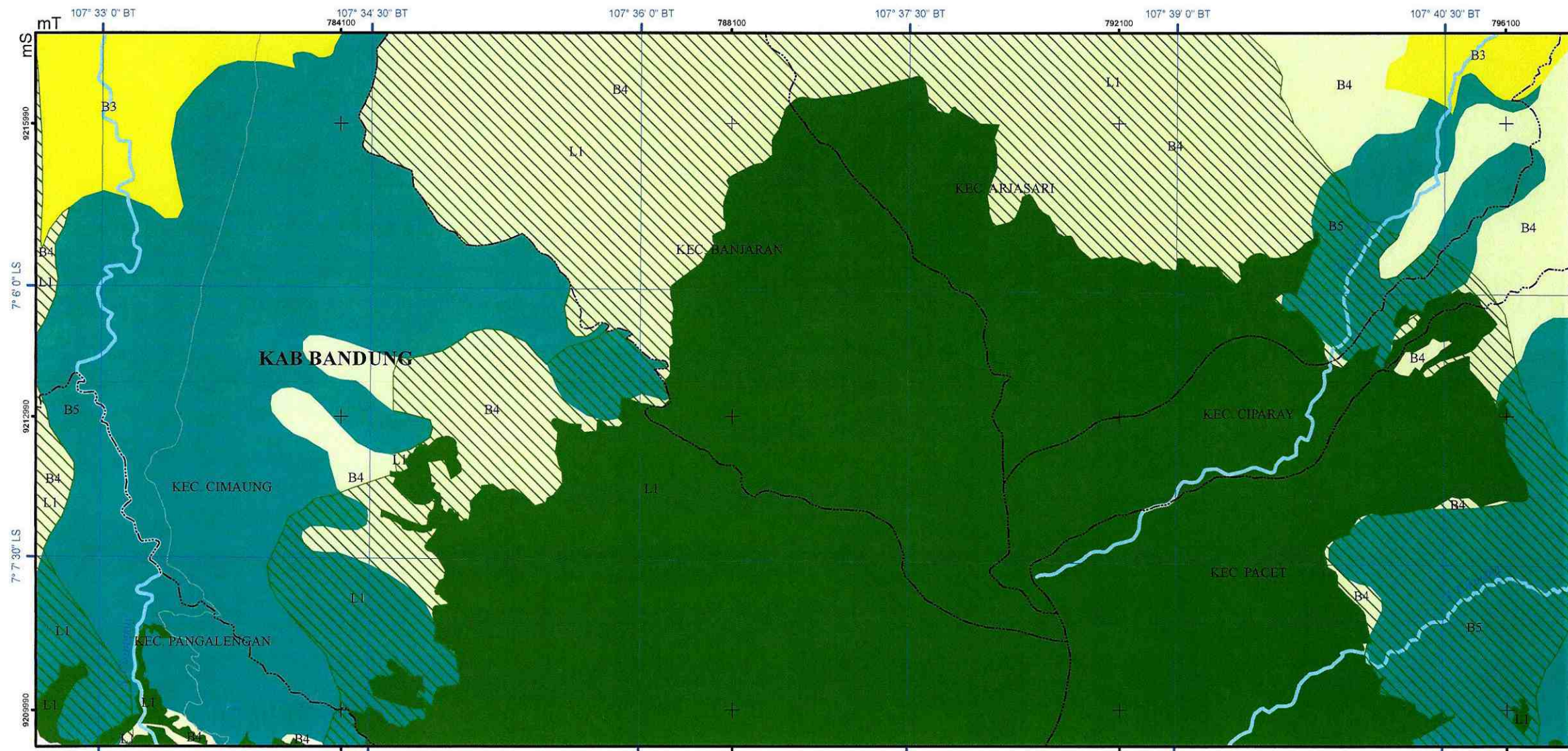


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 08 - 3



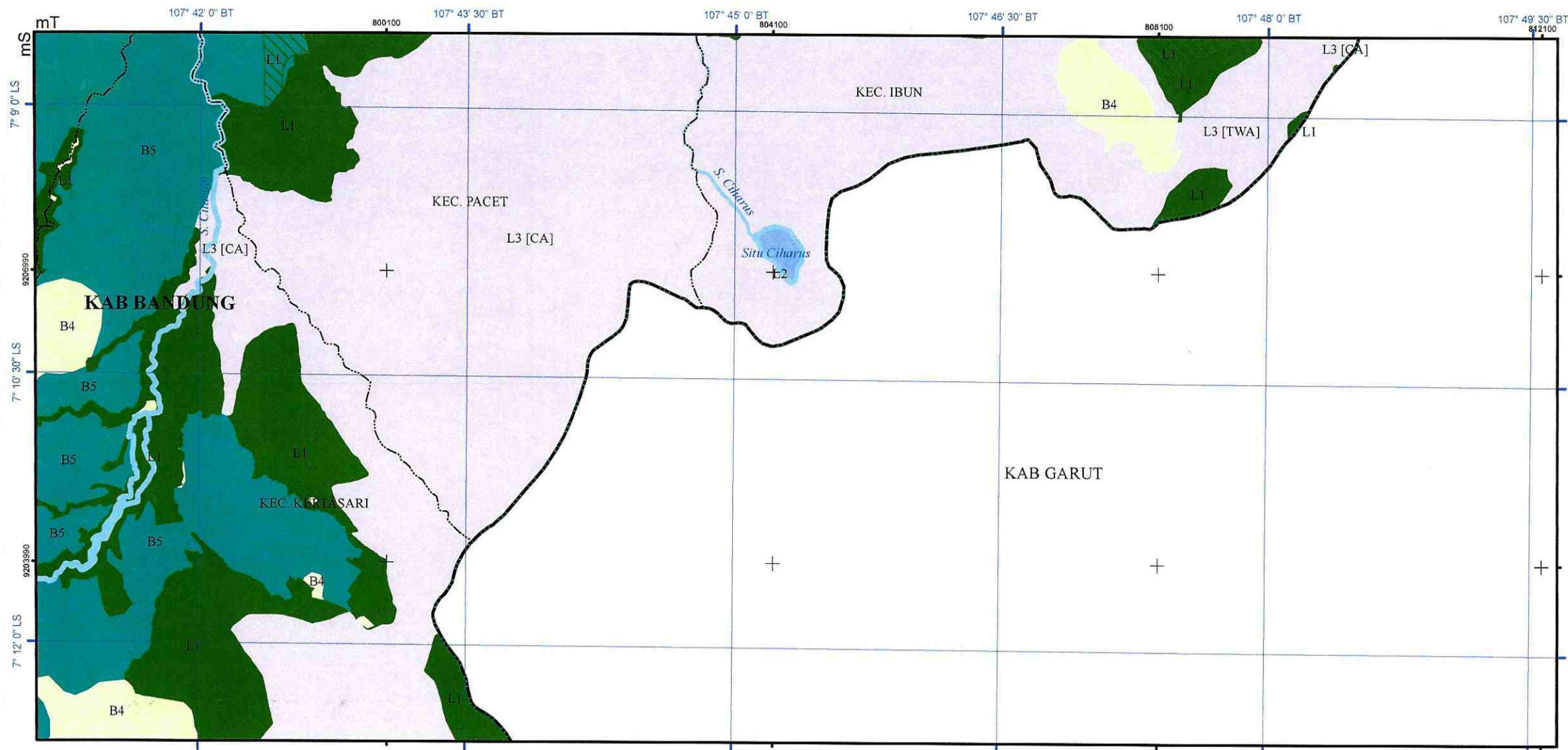


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 08 - 4



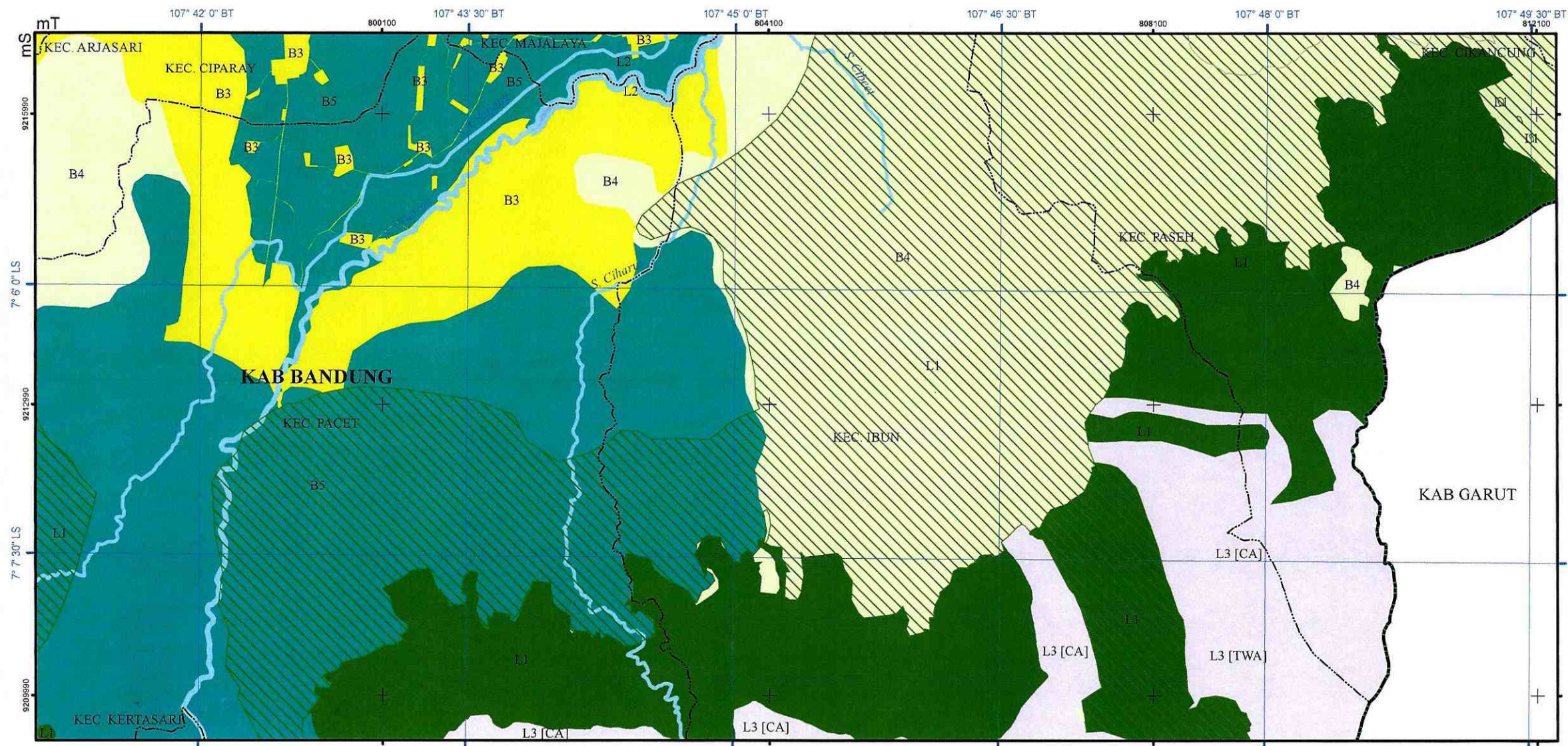


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 09 - 1



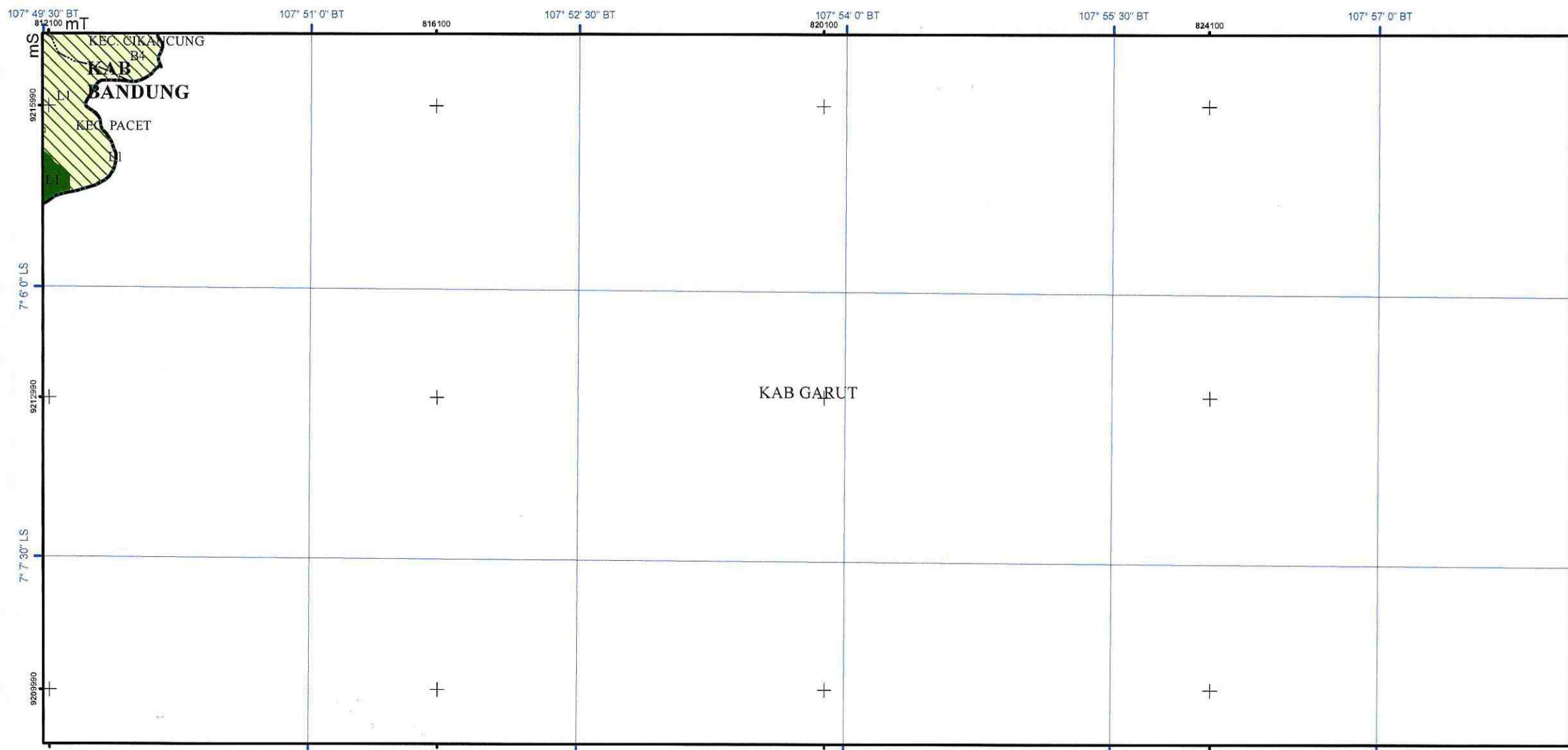


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 09 - 3



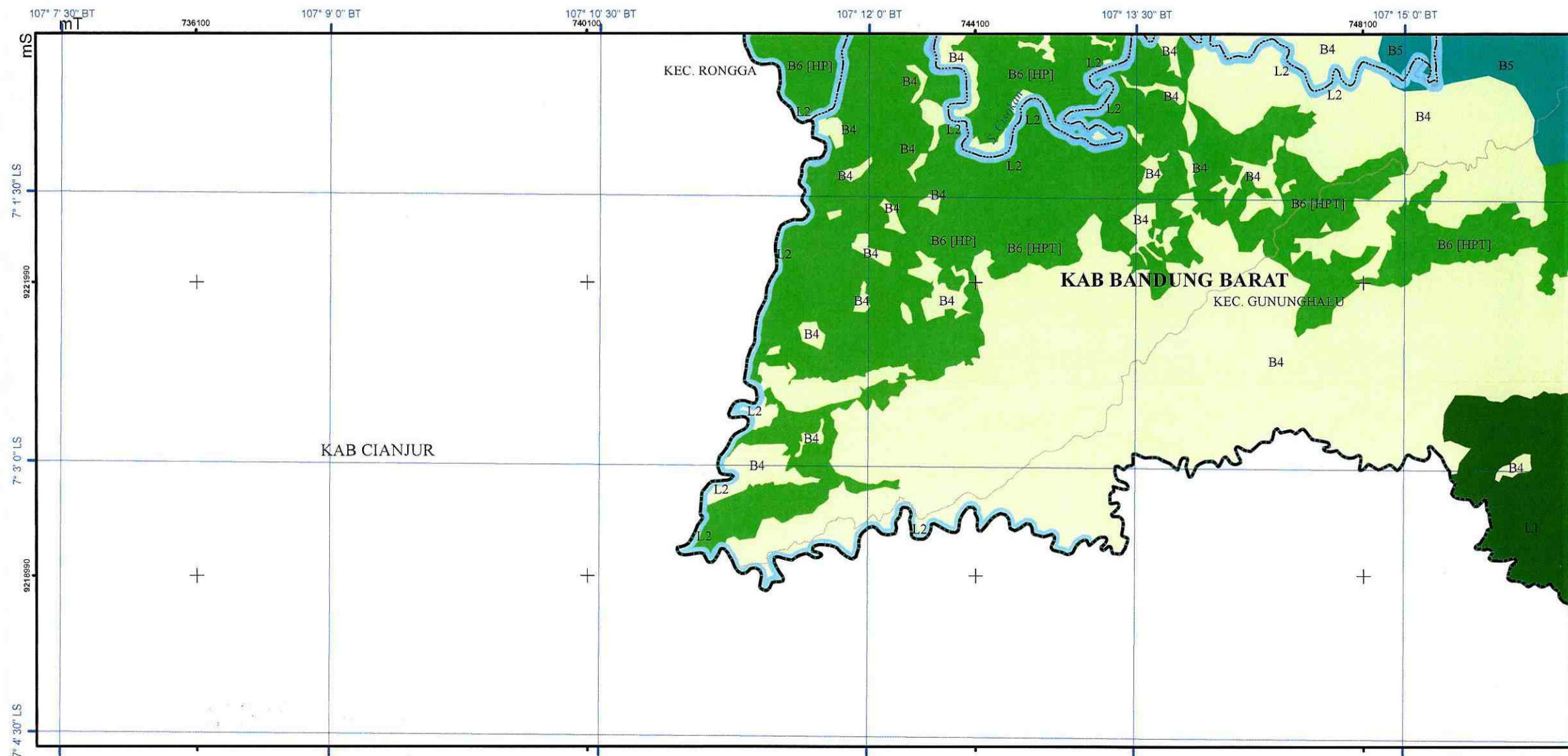


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 09 - 4



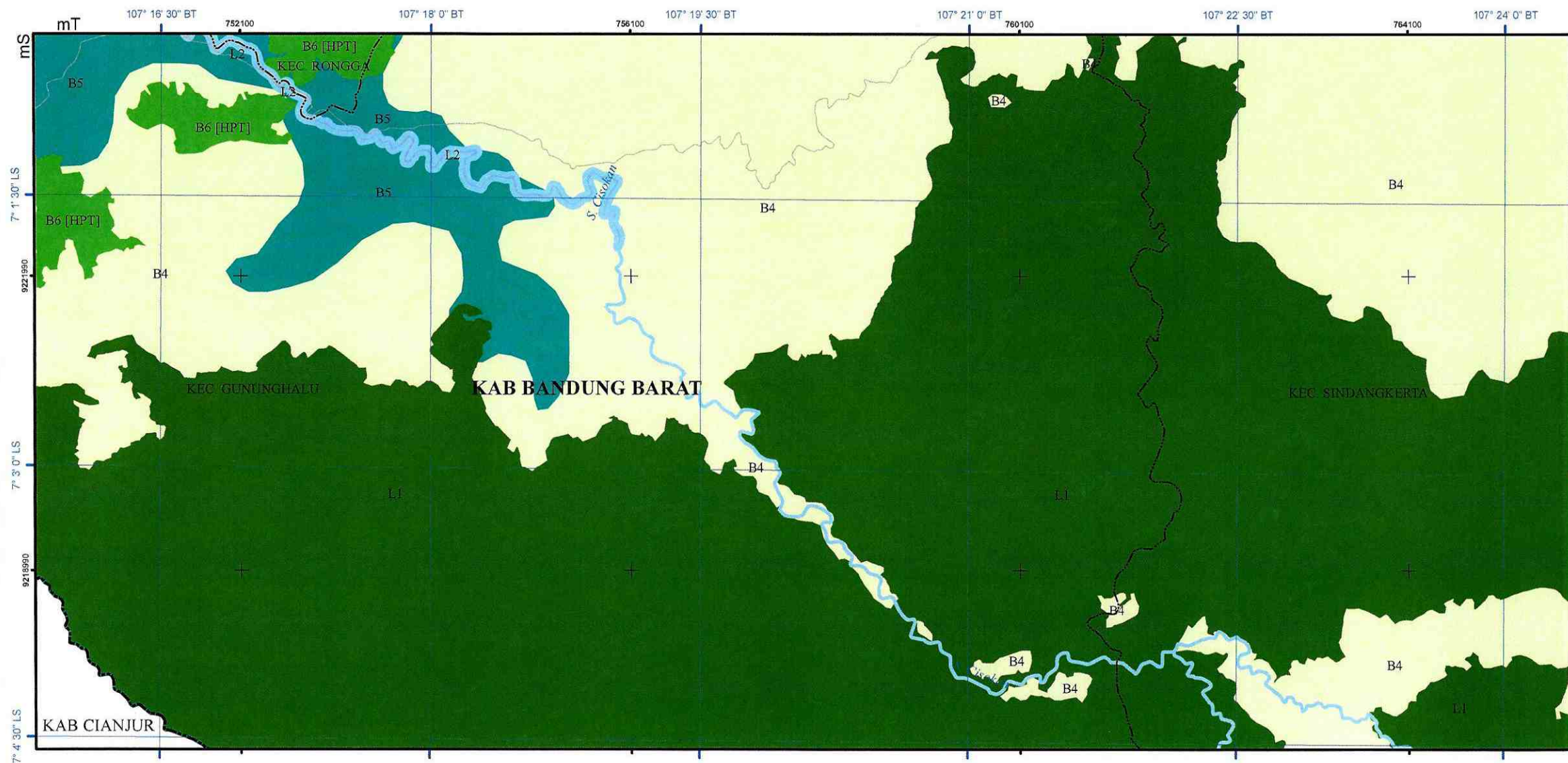


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 12 - 1



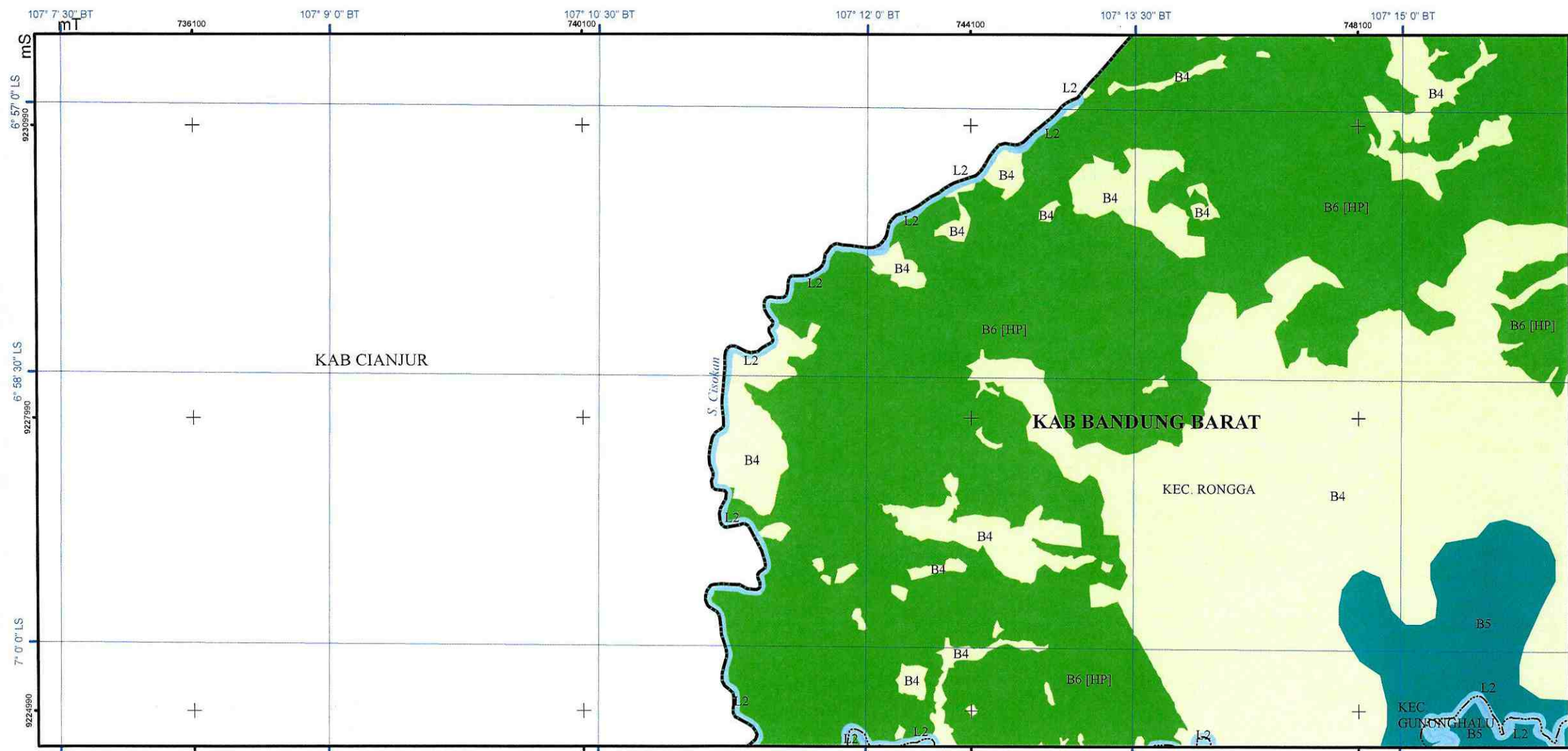


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 12 - 2



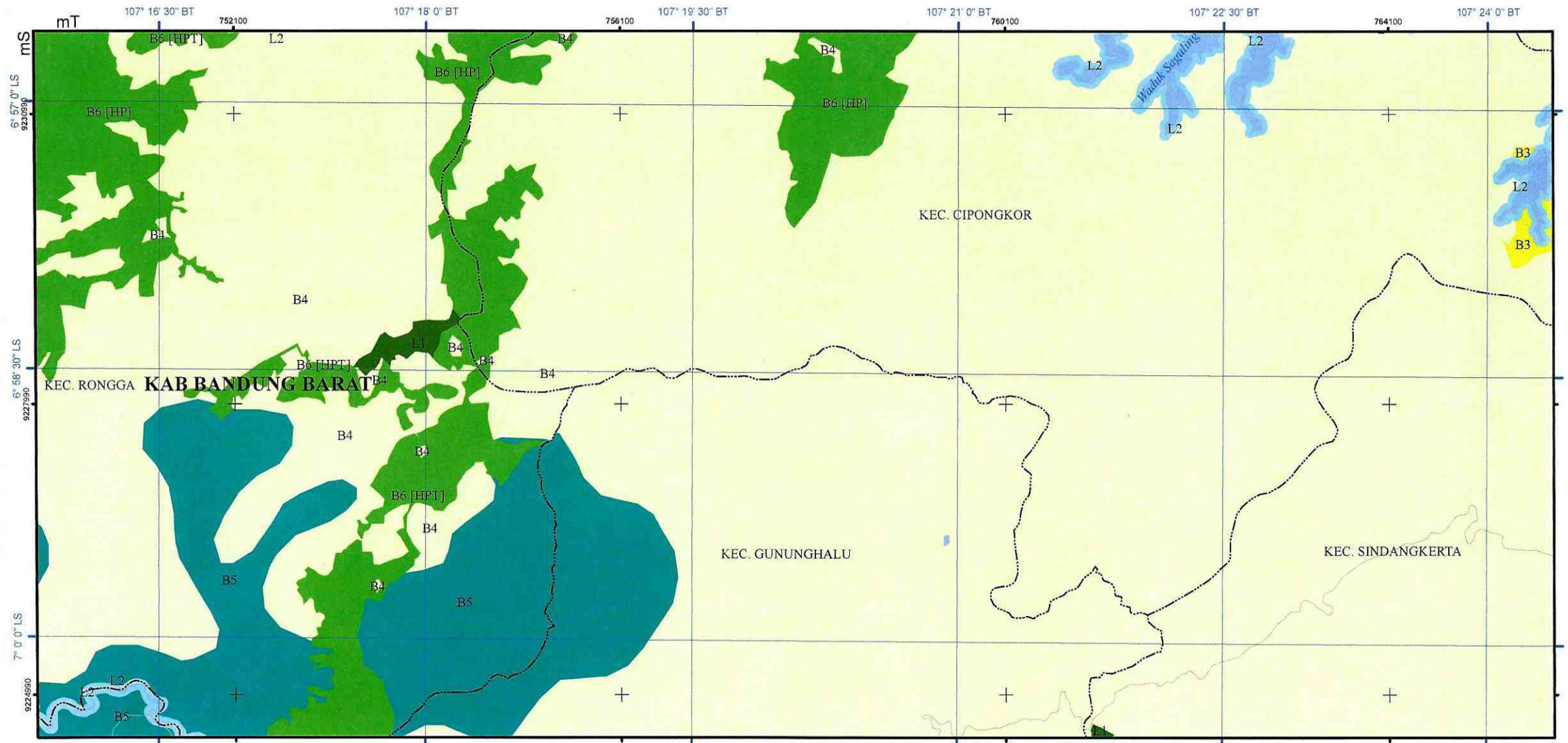


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 12 - 3



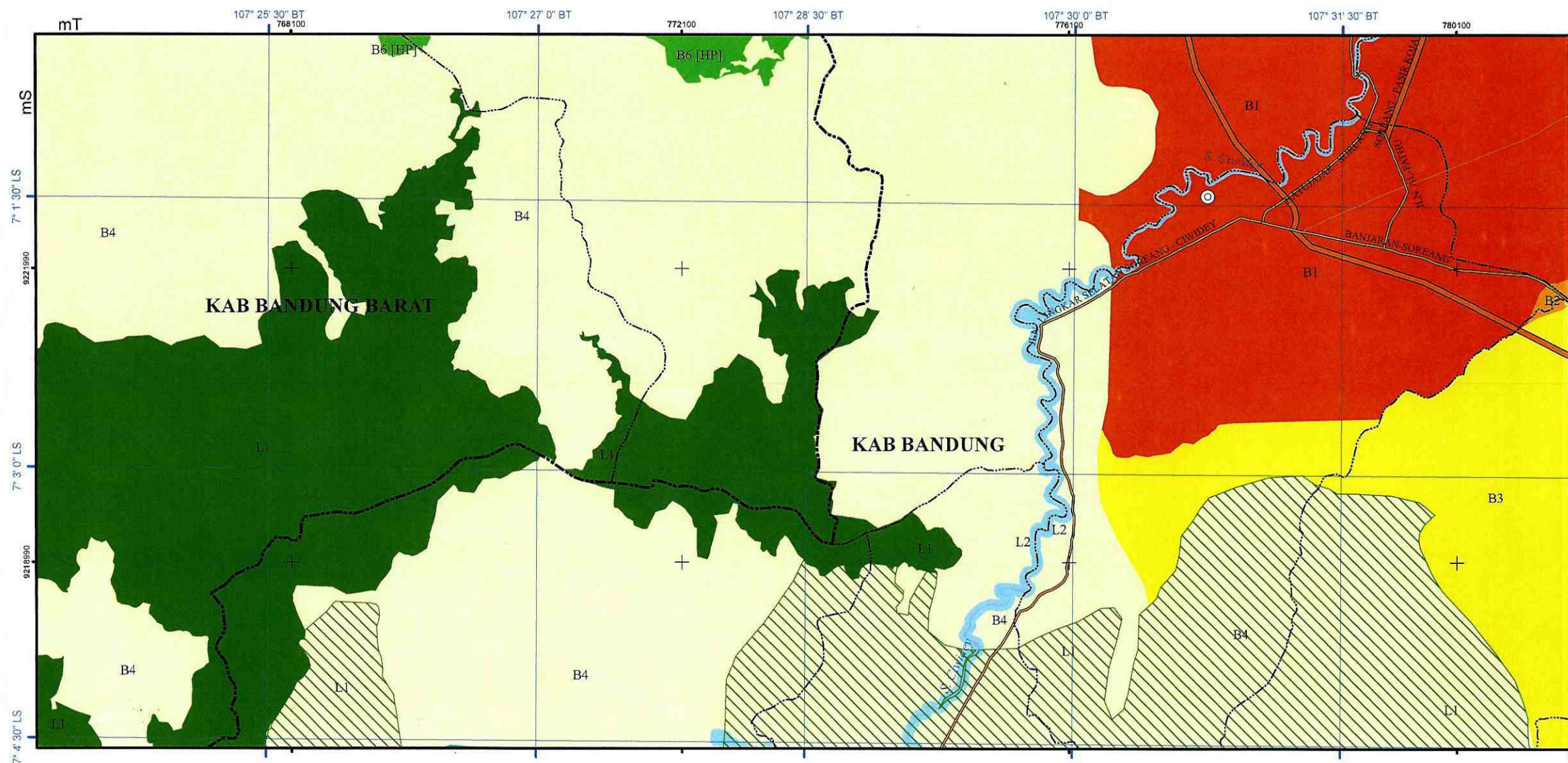


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 12 - 4



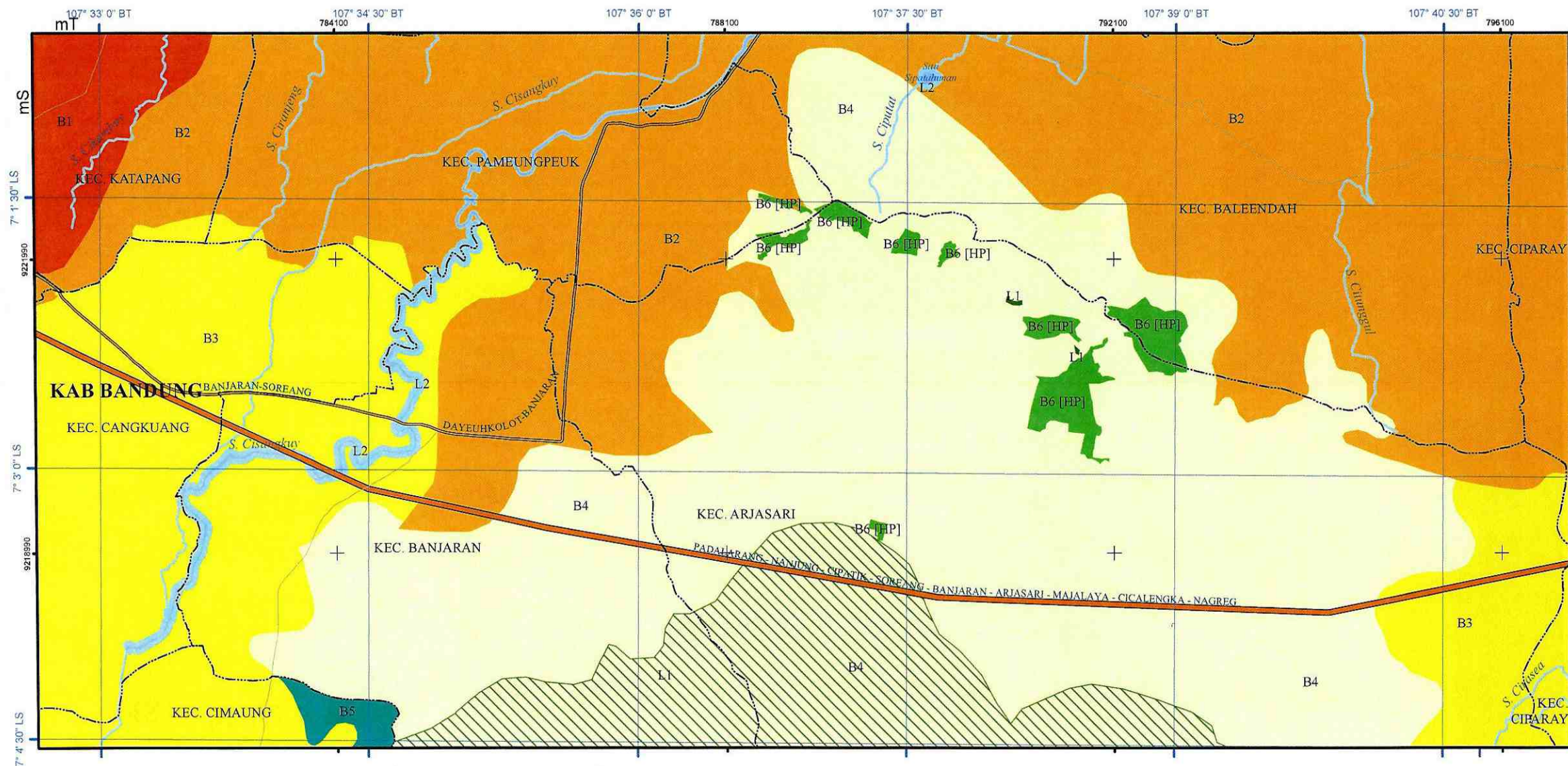


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 13 - 1



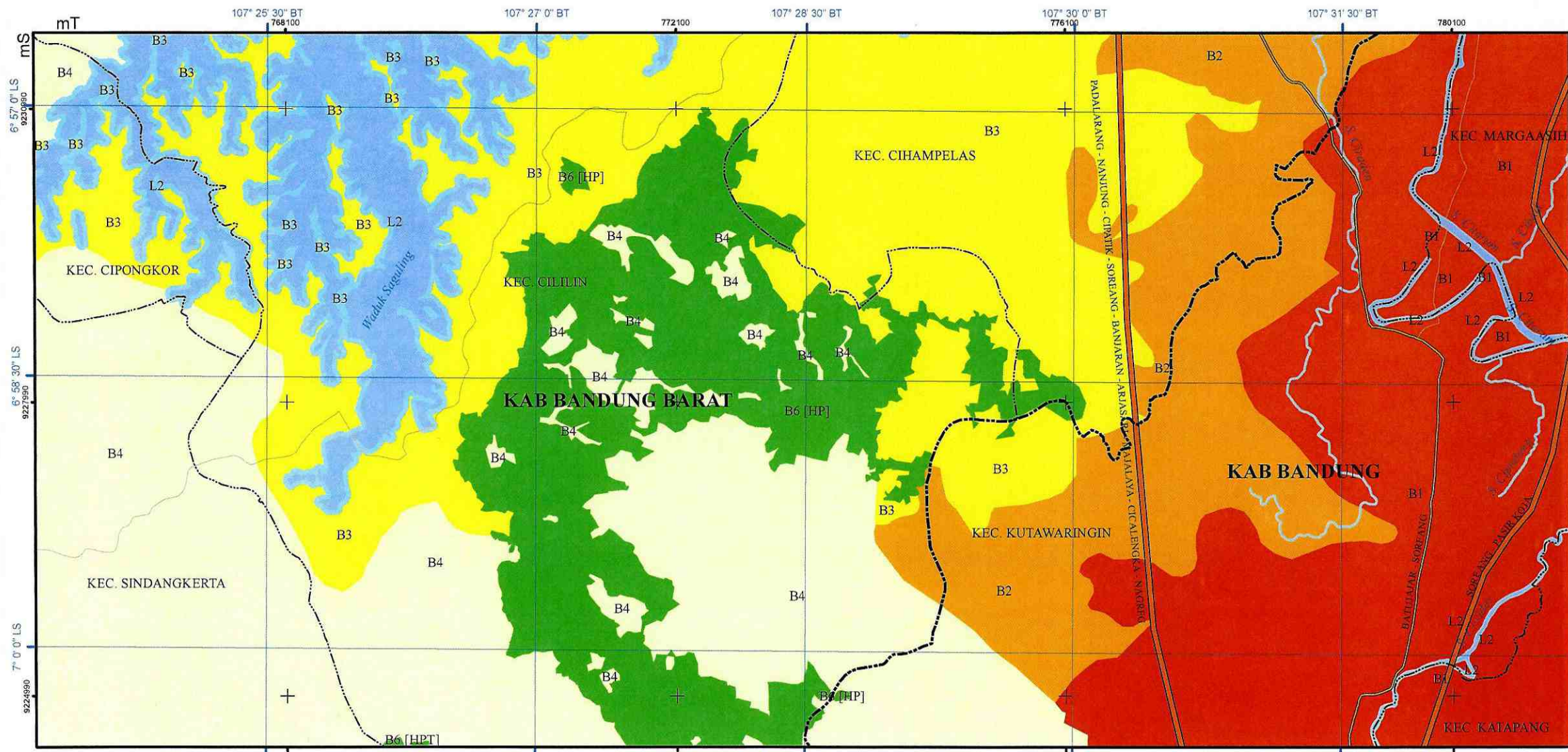


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 13 - 2



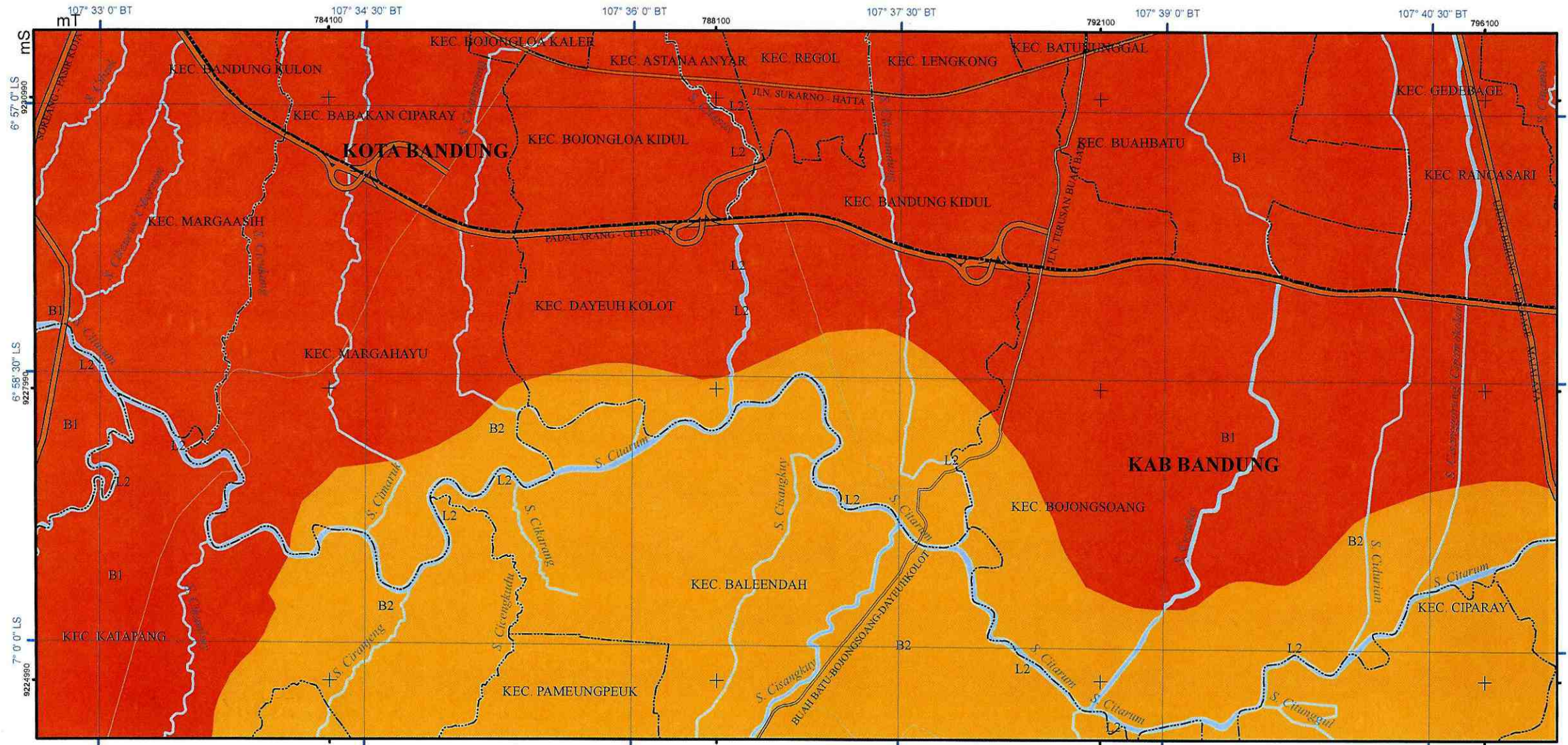


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 13 - 3



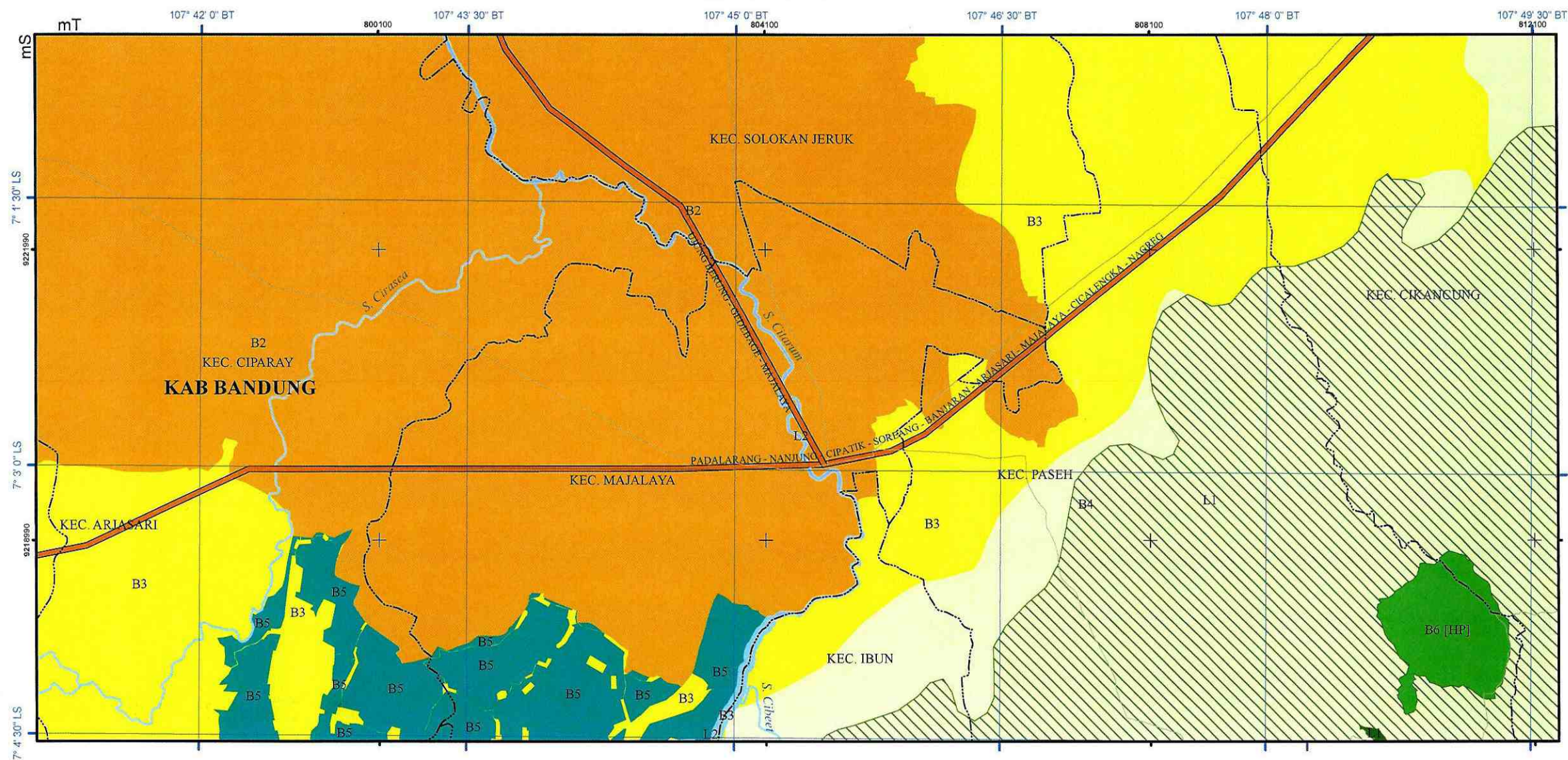


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 13 - 4



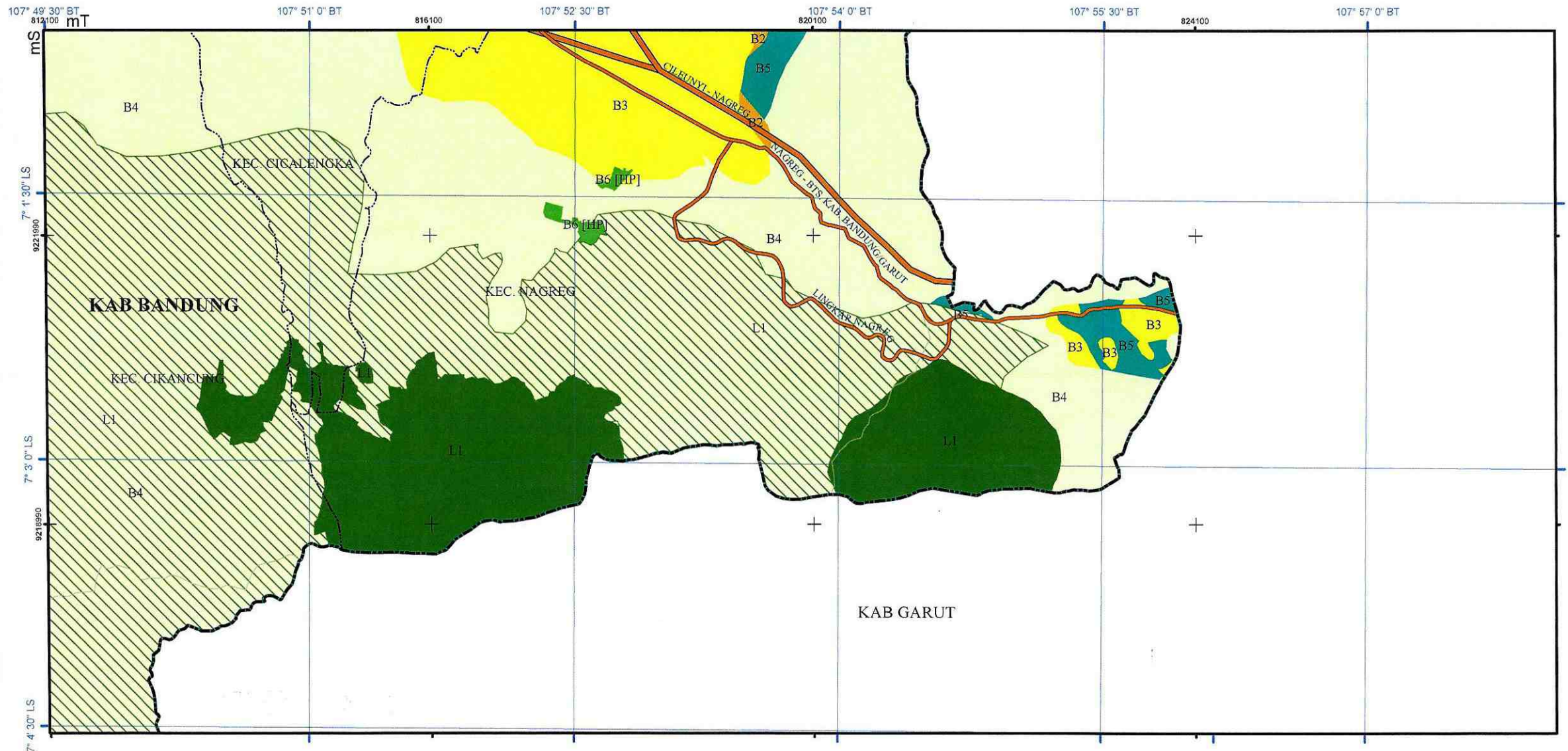


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 14 - 1



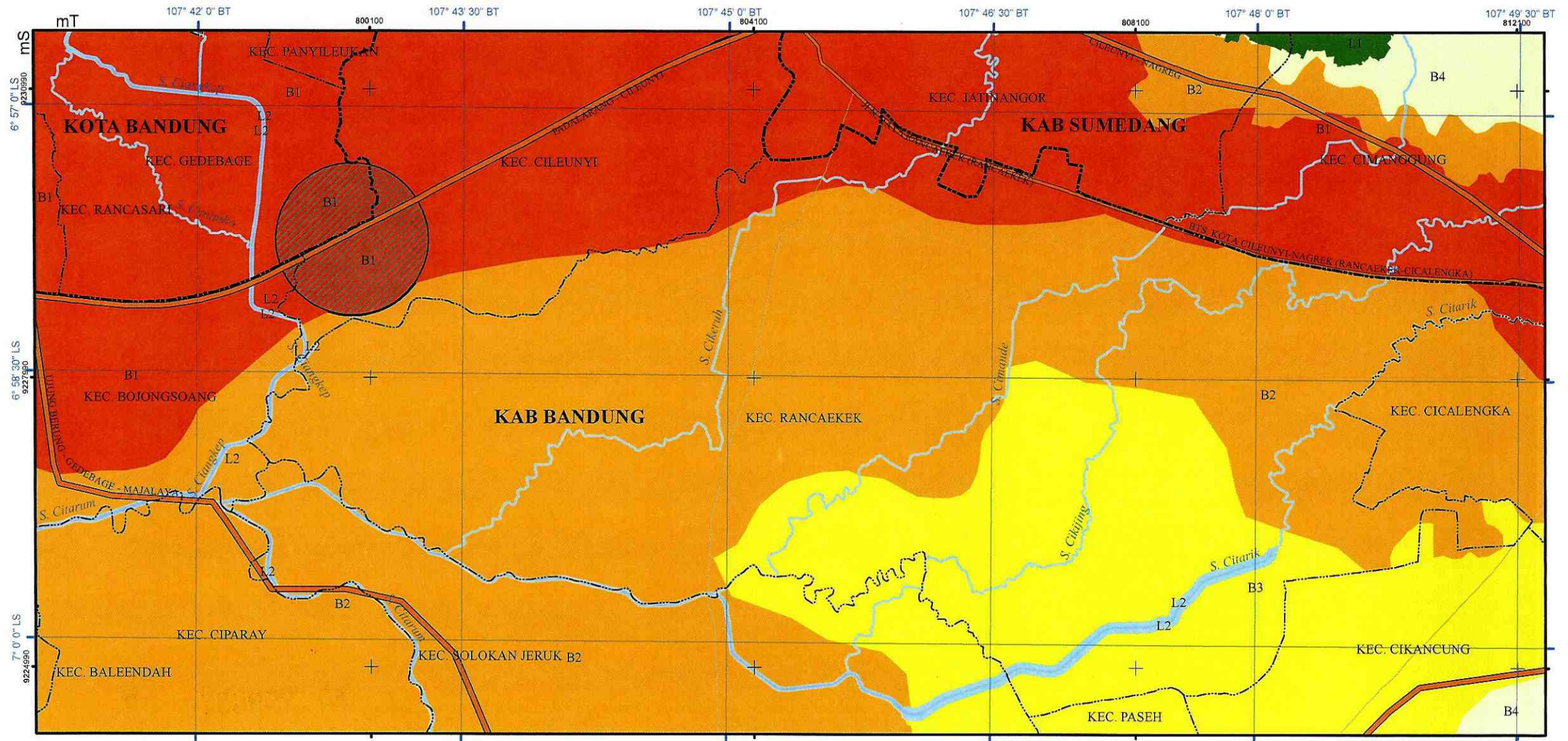


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 14 - 2



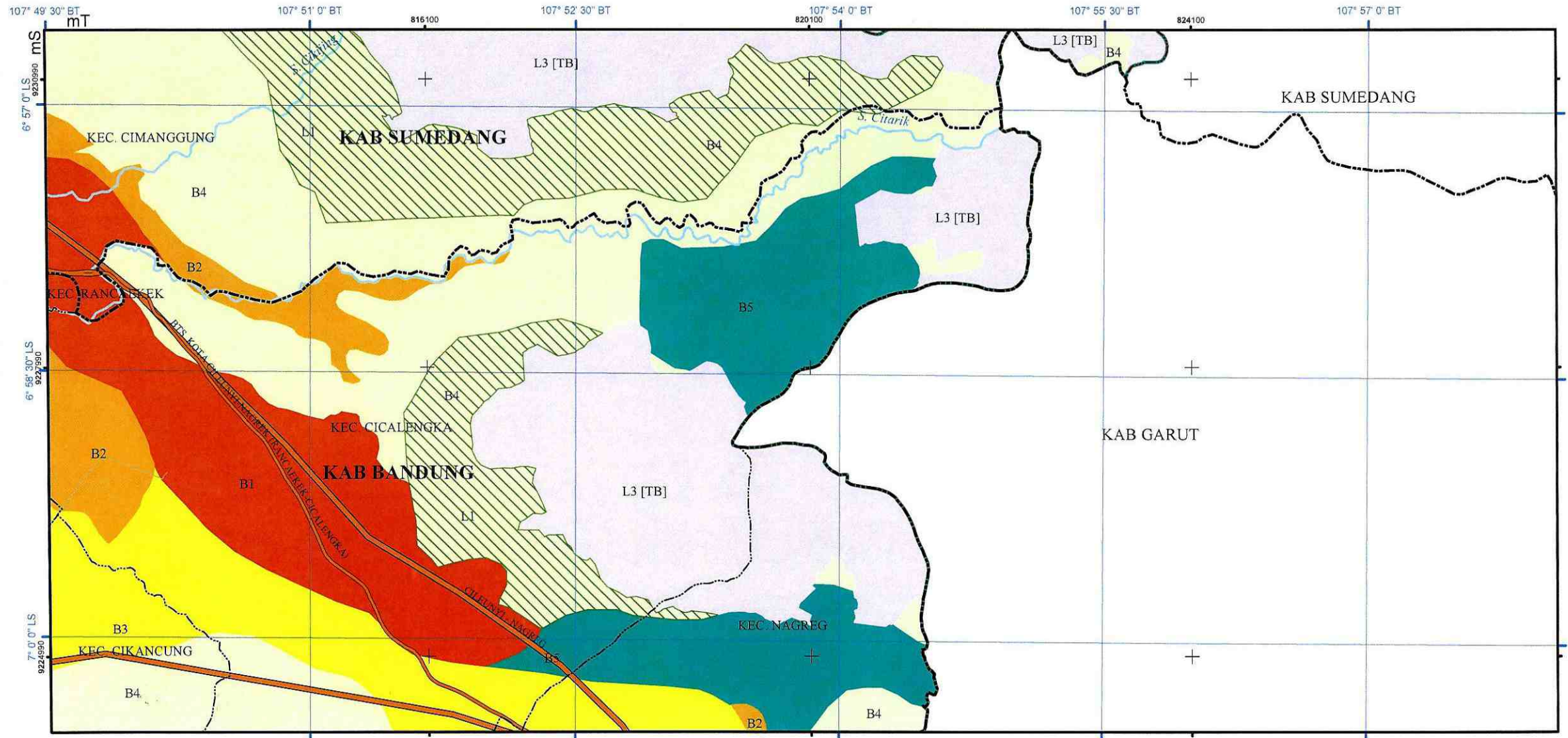


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 14 - 3



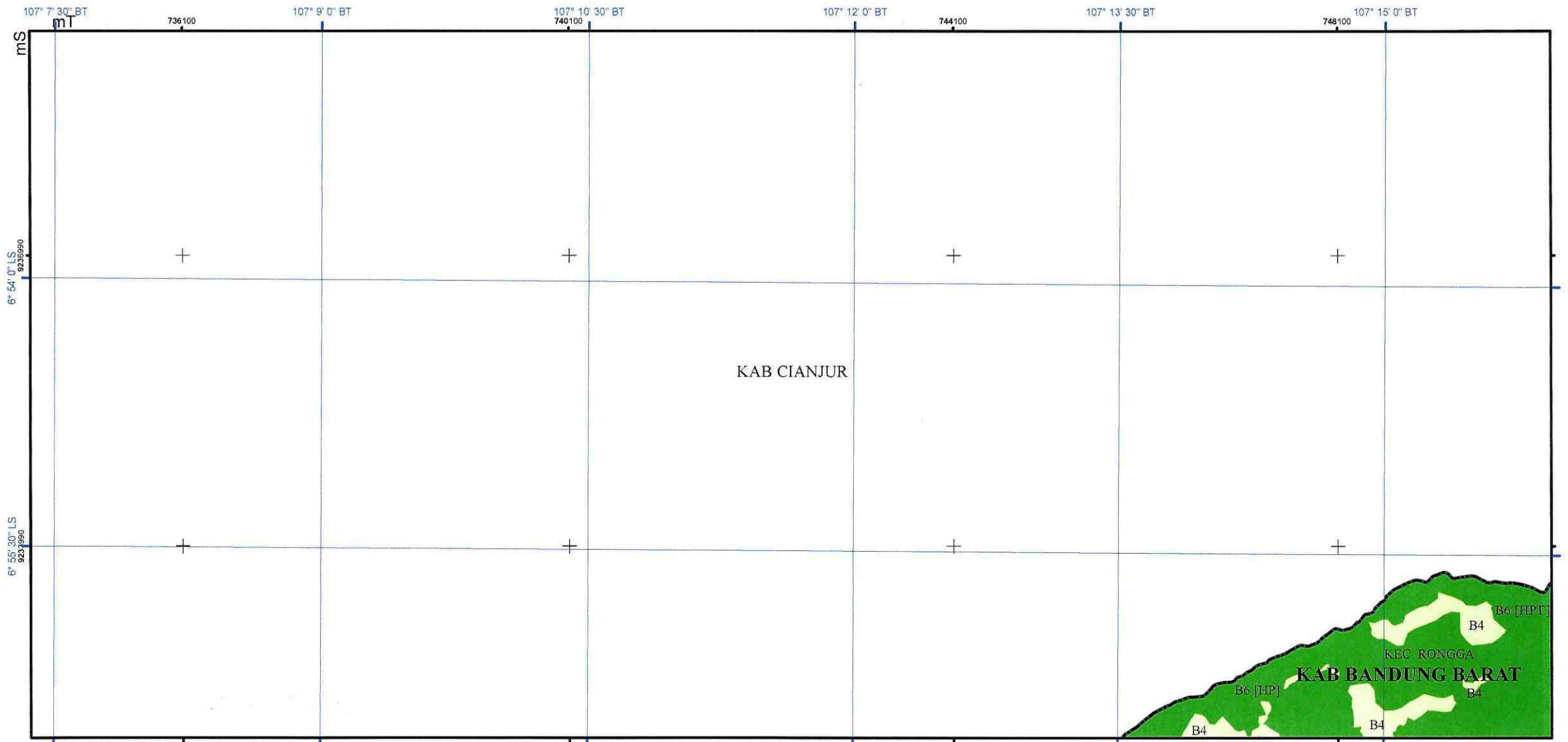


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 14 - 4



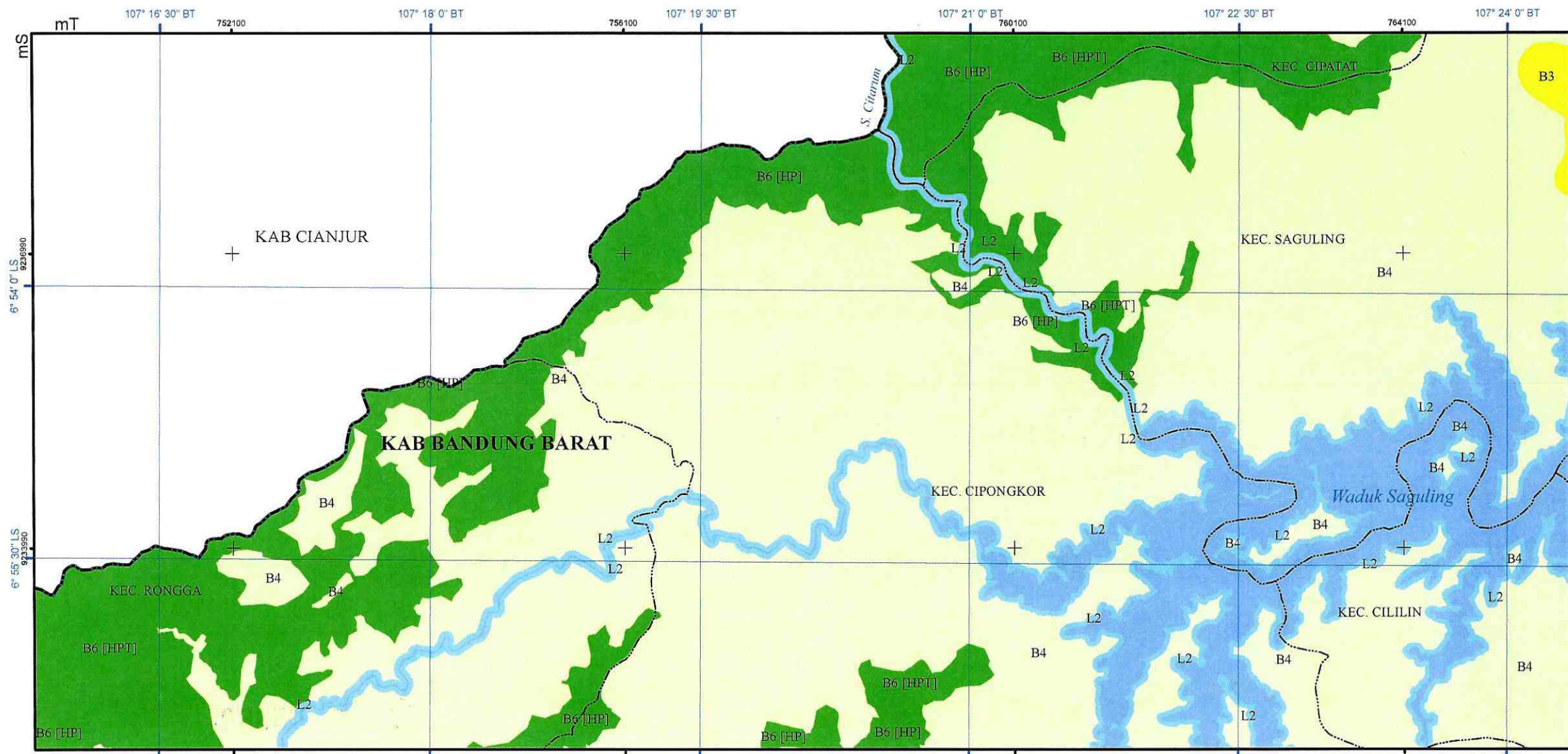


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 17 - 1



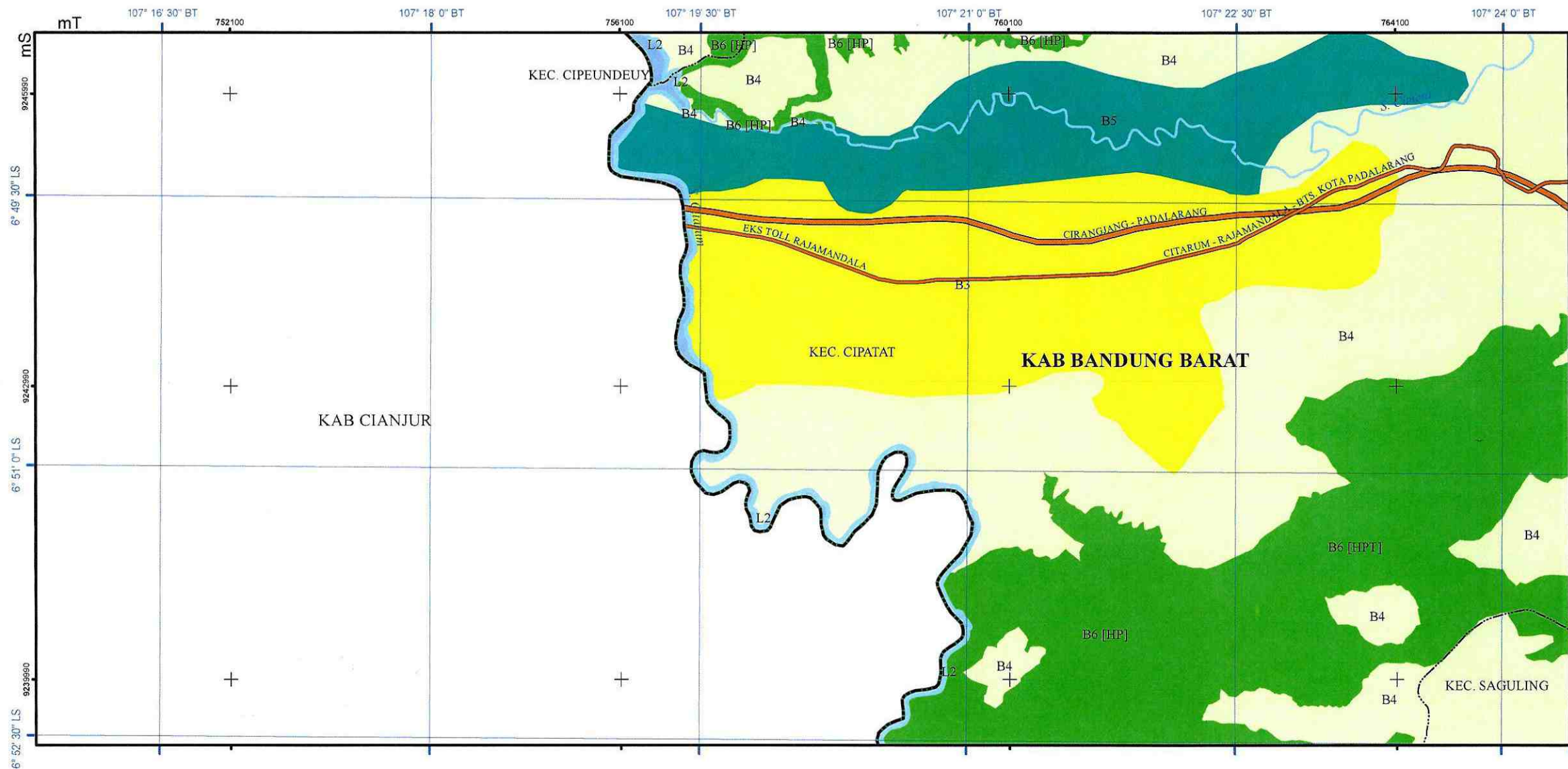


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 17 - 2



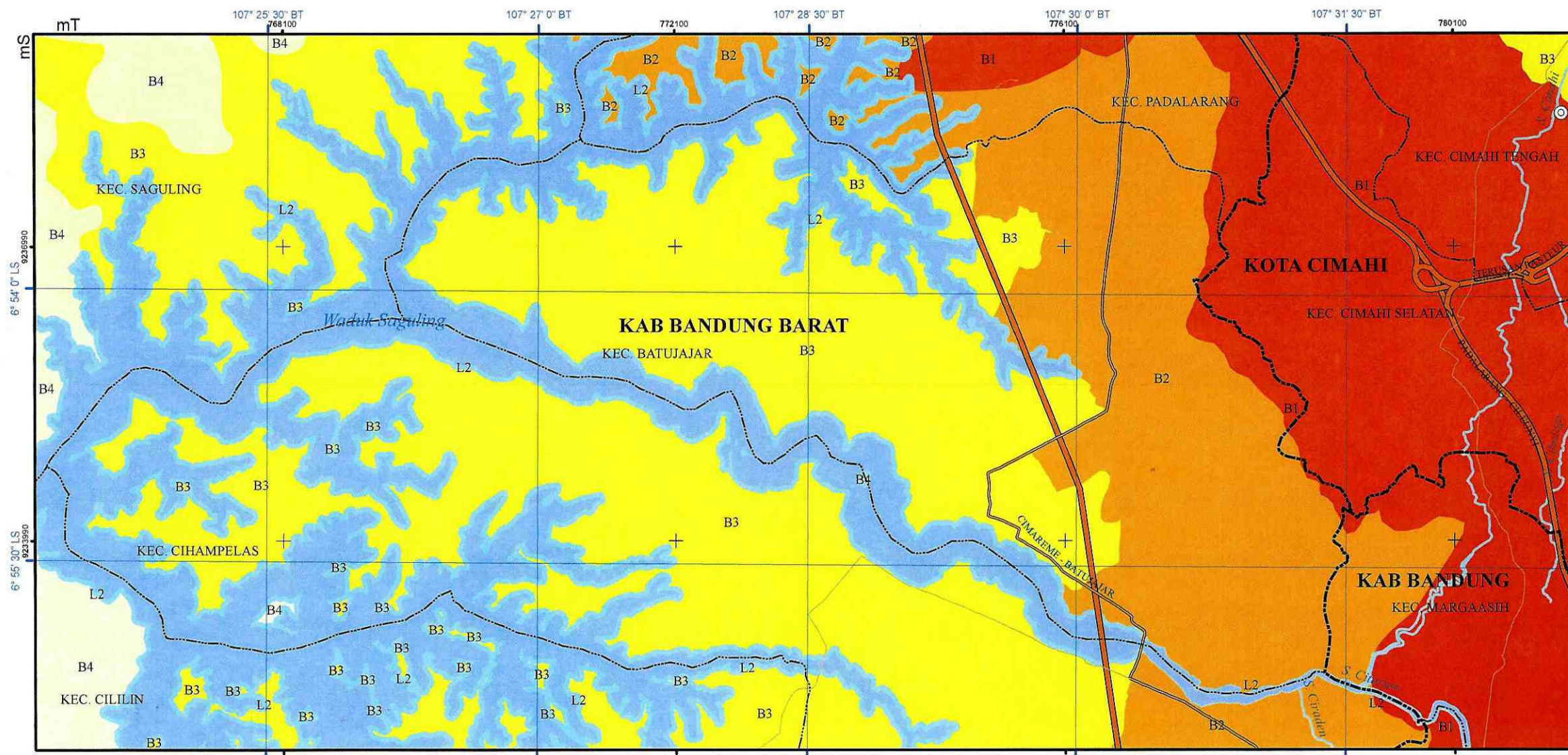


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 17 - 4



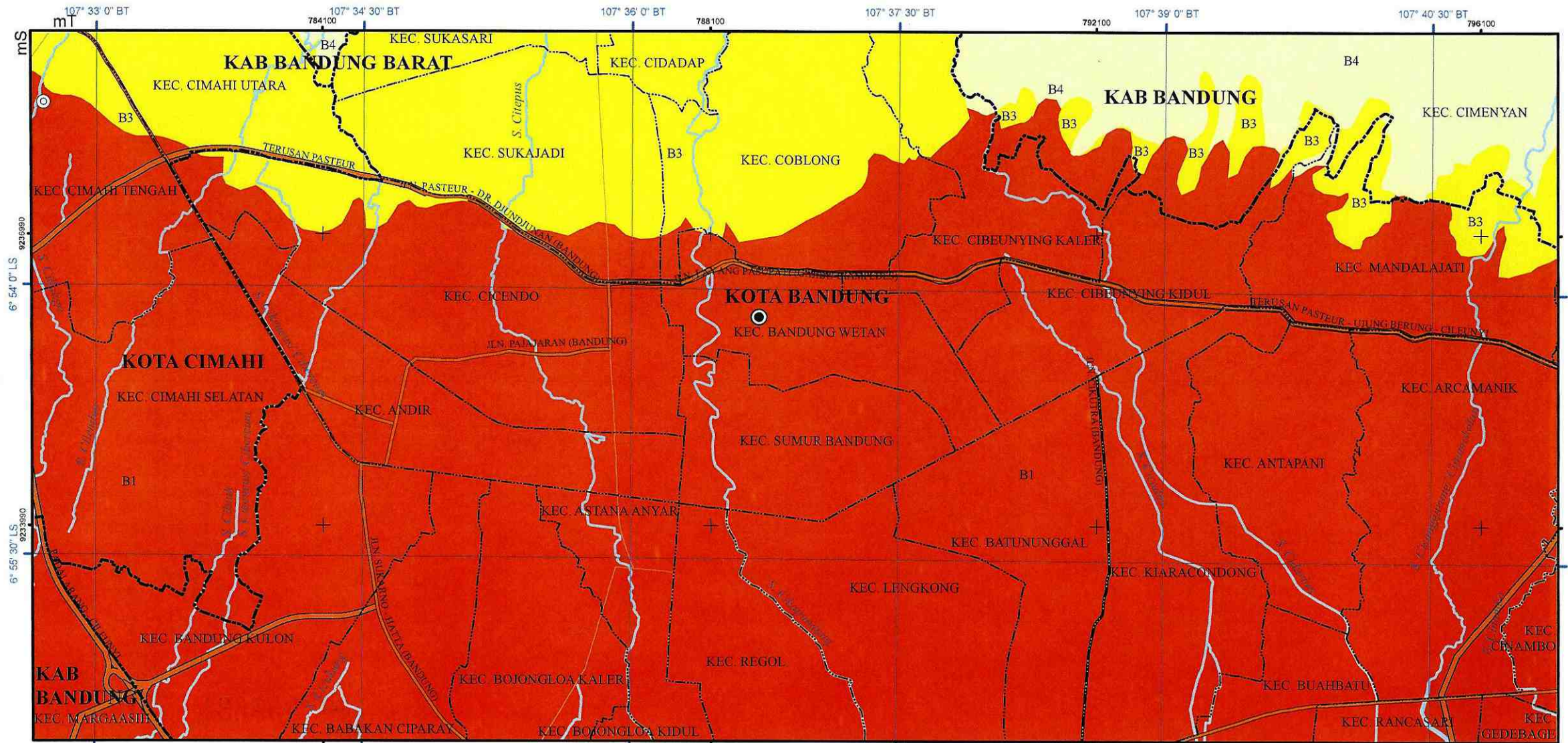


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 18 - 1



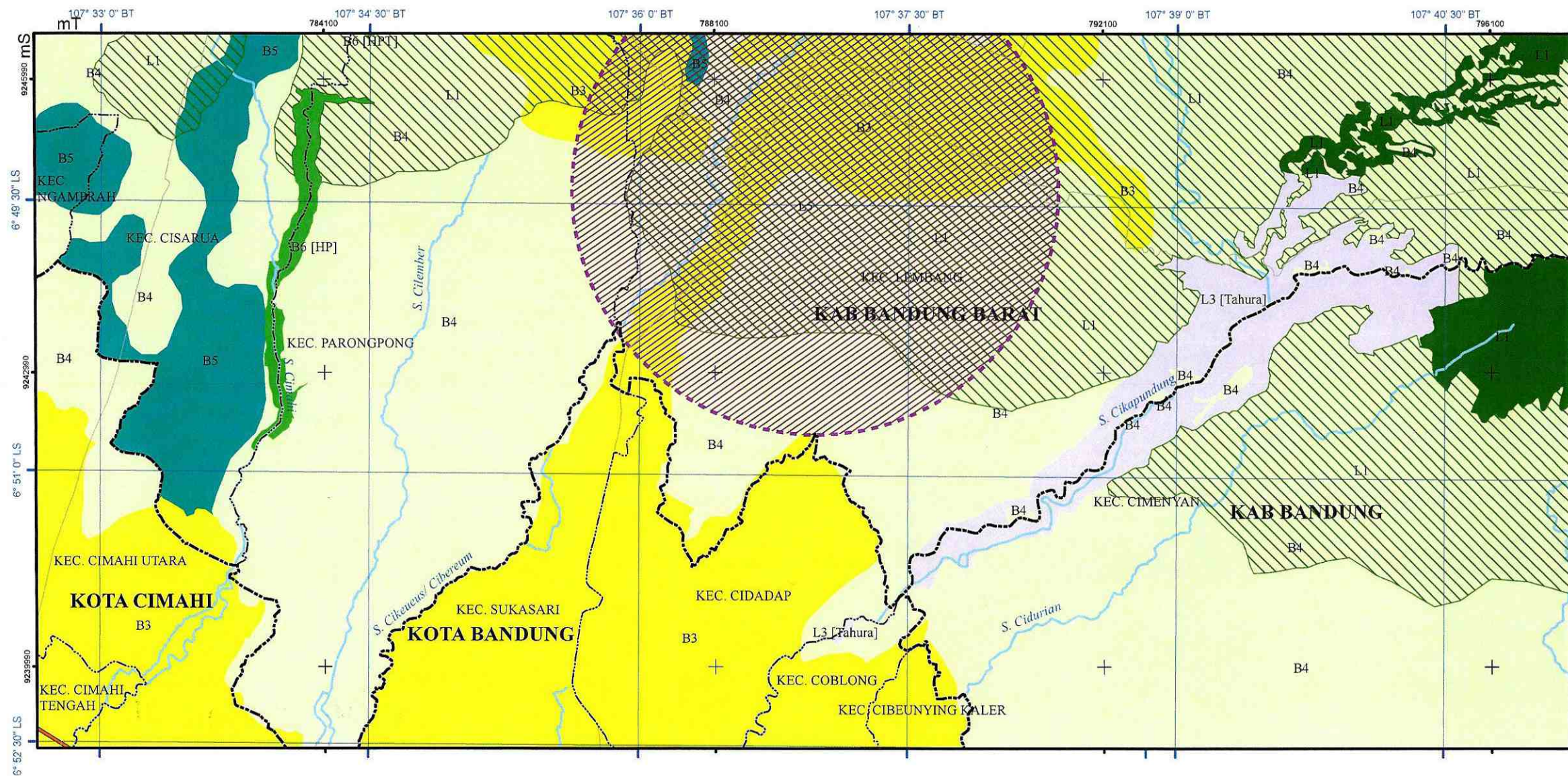


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 18 - 2



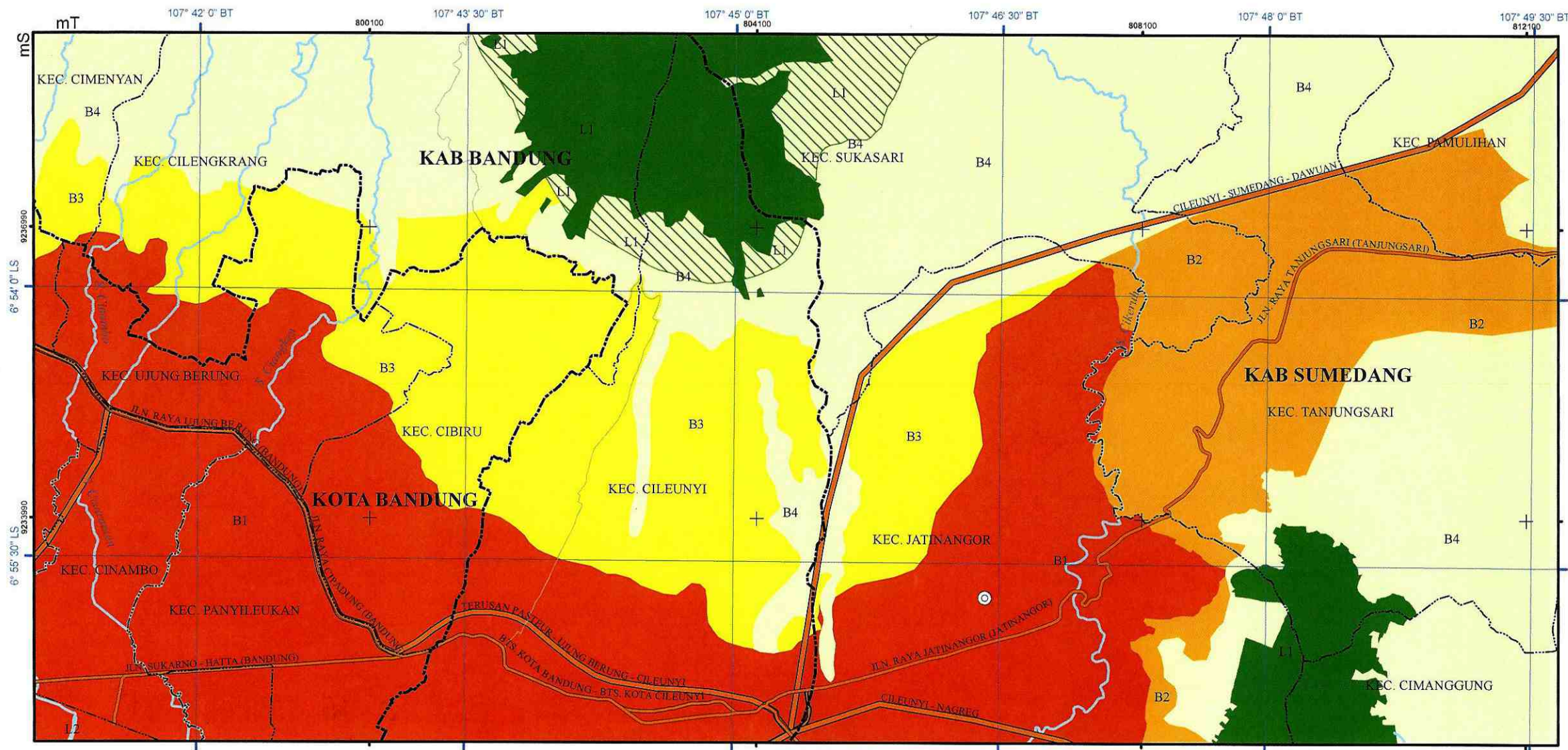


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 18 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 19 - 1



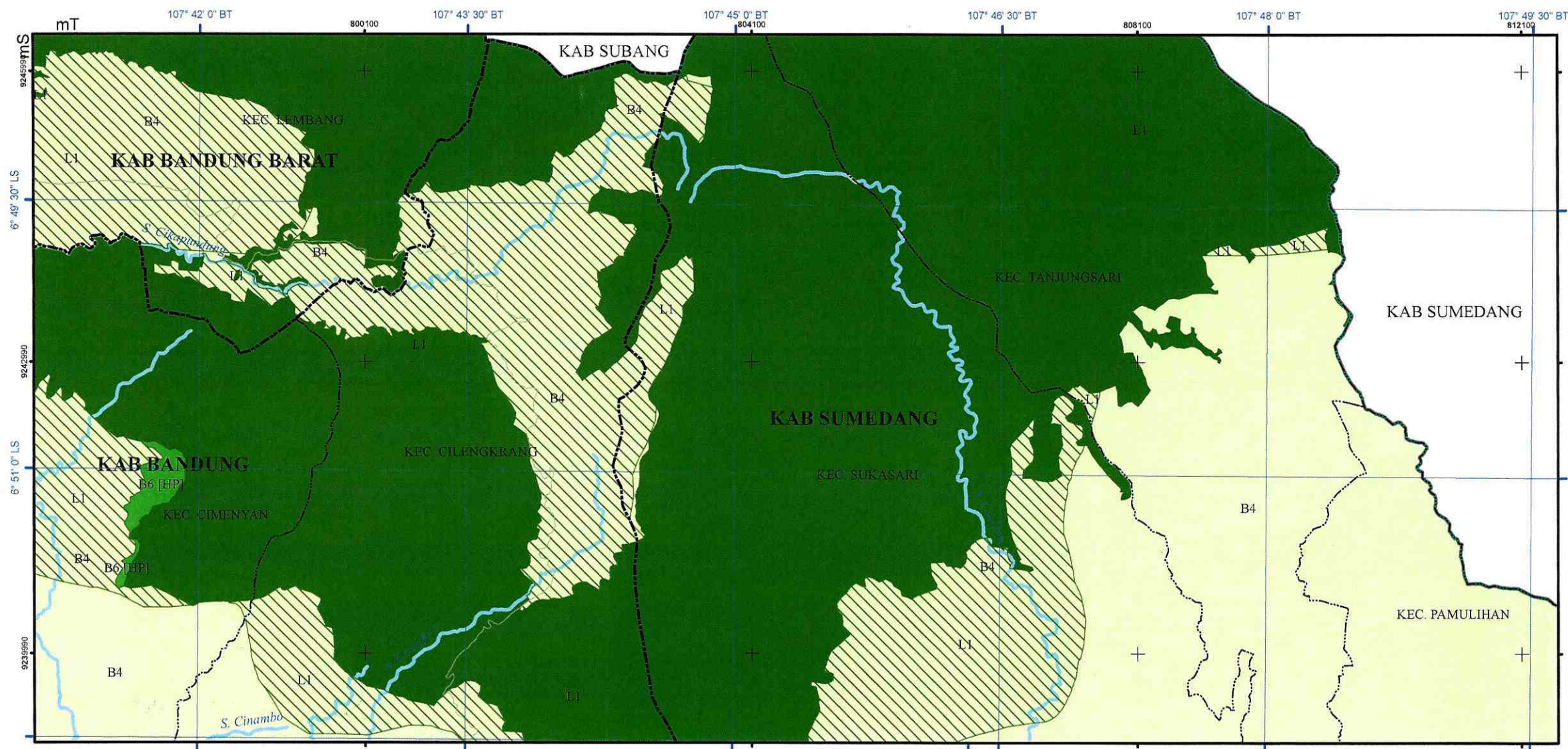


The map displays the administrative boundaries of Kab. Sumedang, West Java. Key features include:

- Administrative Divisions:** Kecamatan Pamulihan, Tanjungsari, and Cimanggung.
- Land Use:** Various land use codes are indicated, including B4, B6 [HP], B2, L1, L3 [TB], and S. Cikijing.
- Infrastructure:** A road network is shown, including a red line representing a major road and a blue line representing a river (S. Cikijing).
- Geographic Features:** The map shows the coastline and surrounding areas, including the city of Bandung (KAB. BANDUNG) to the west.
- Coordinate System:** The map is overlaid with a coordinate grid, with latitude and longitude coordinates marked along the edges.
- Scale:** A scale bar is provided at the bottom left, indicating distances in meters (0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000).

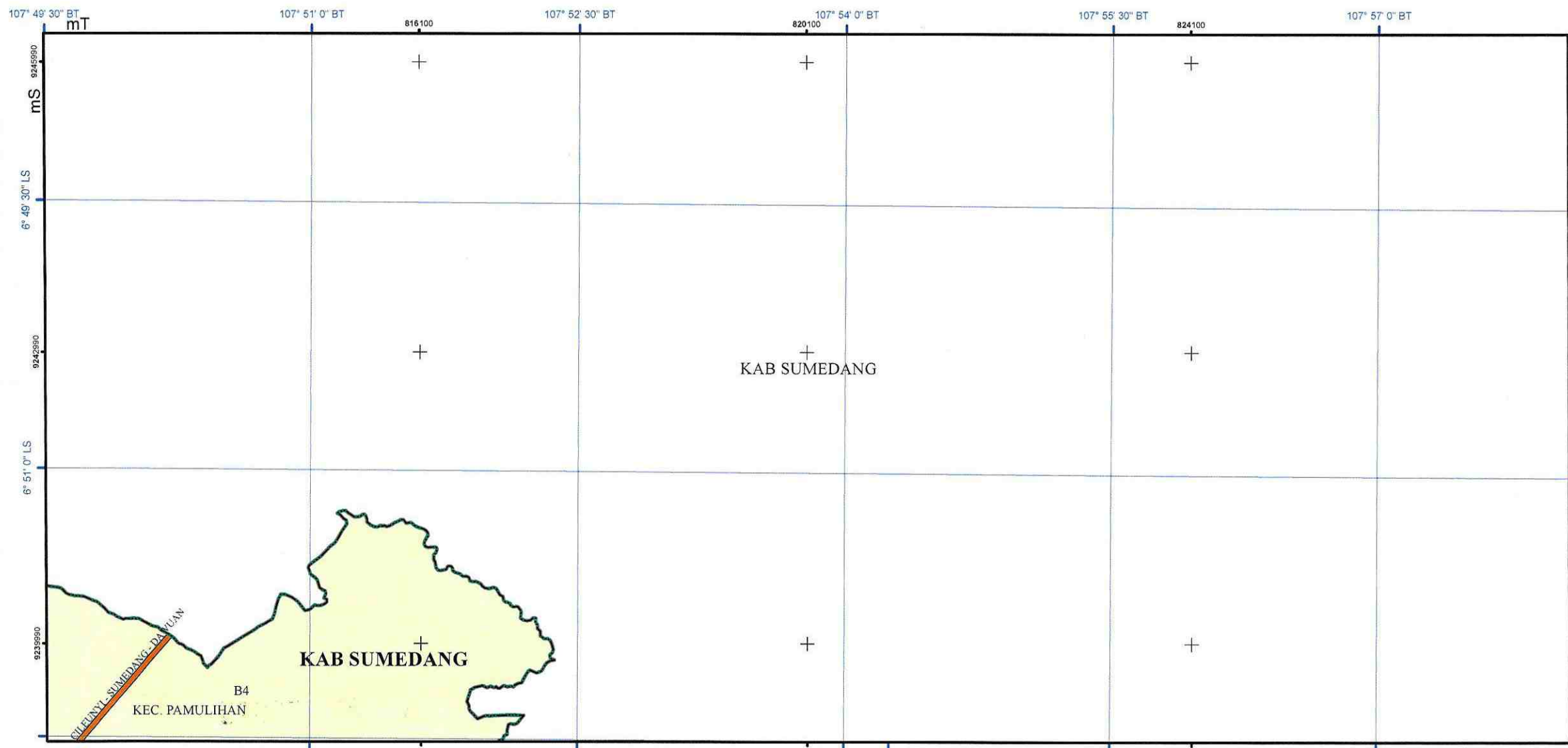


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 19 - 3



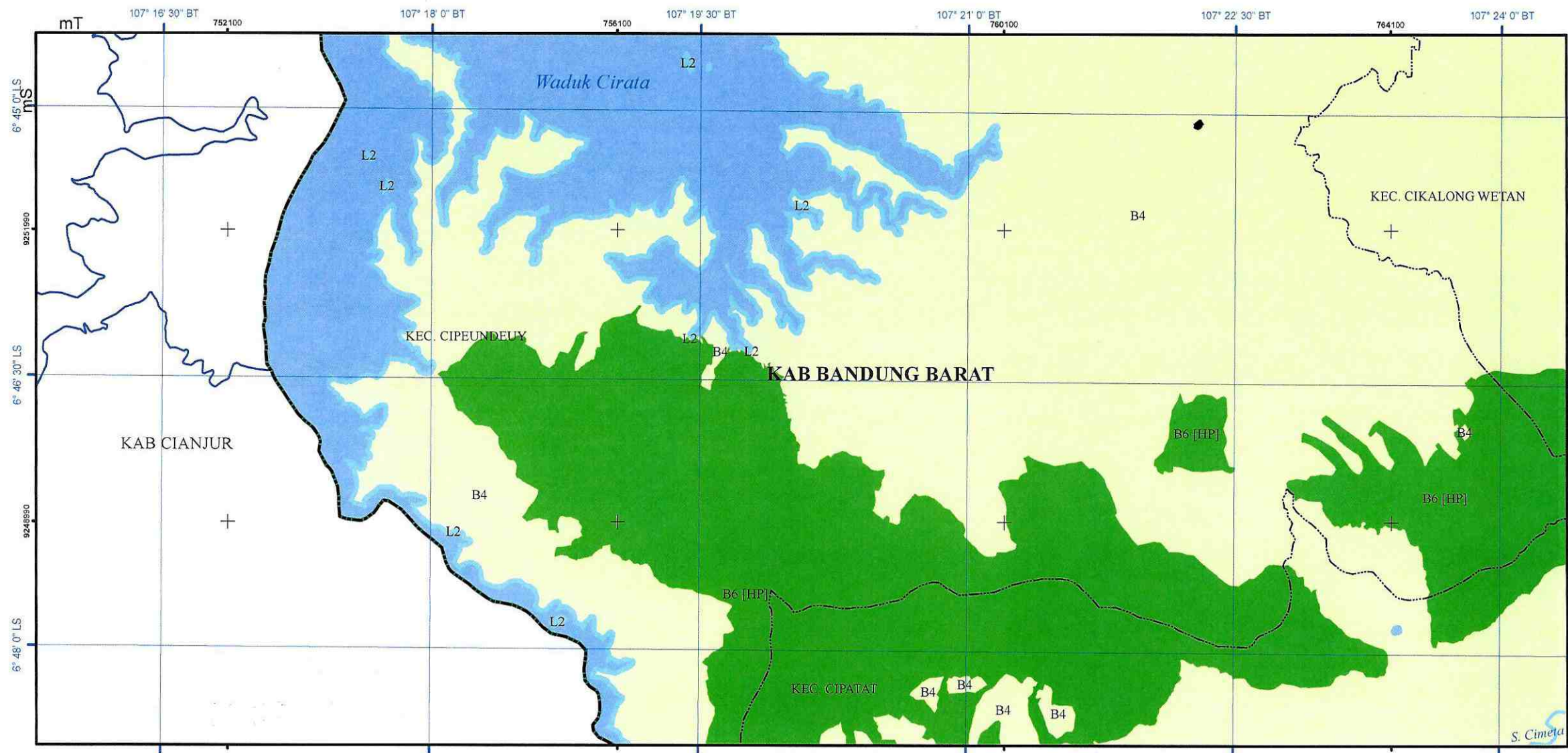


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 19 - 4



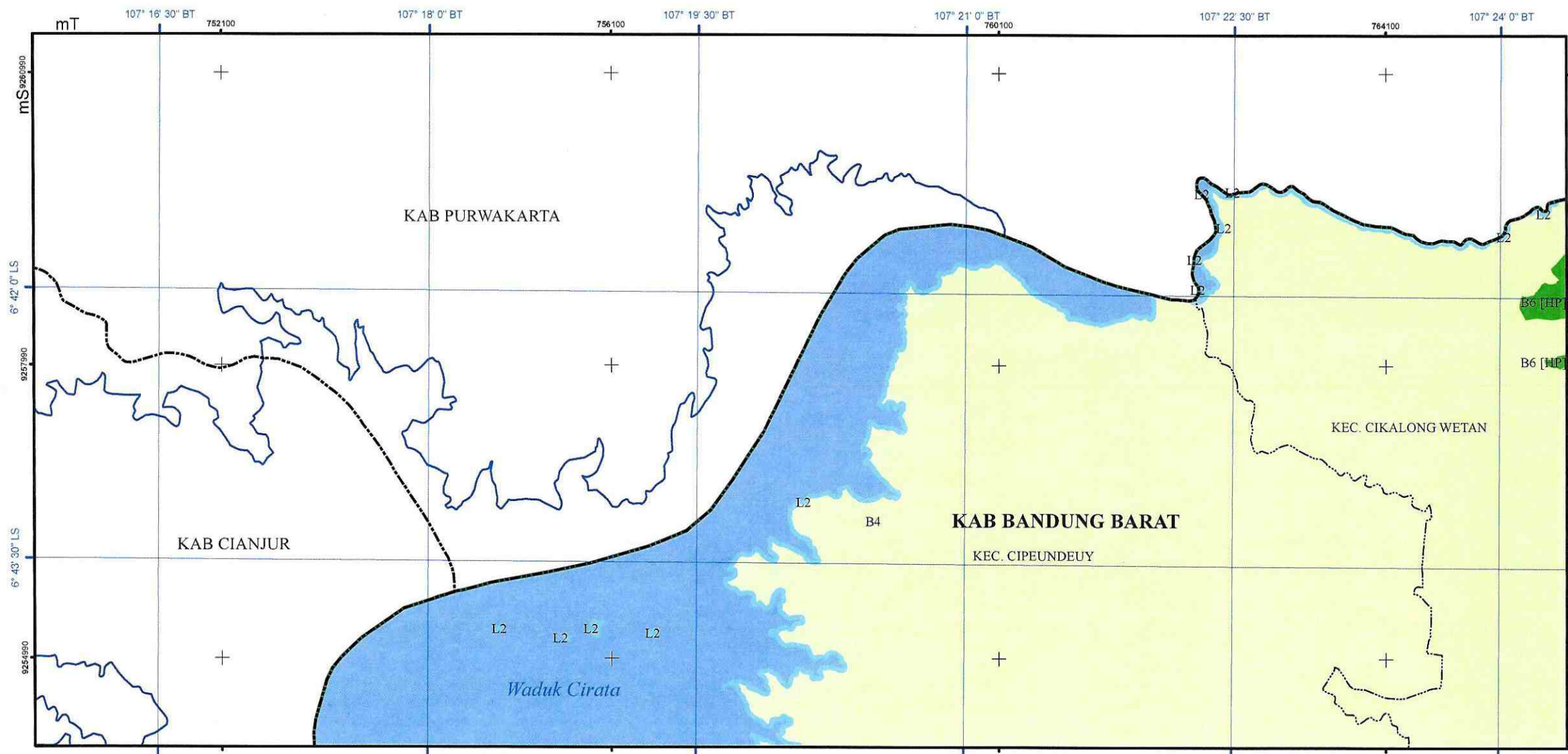


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 22 - 2



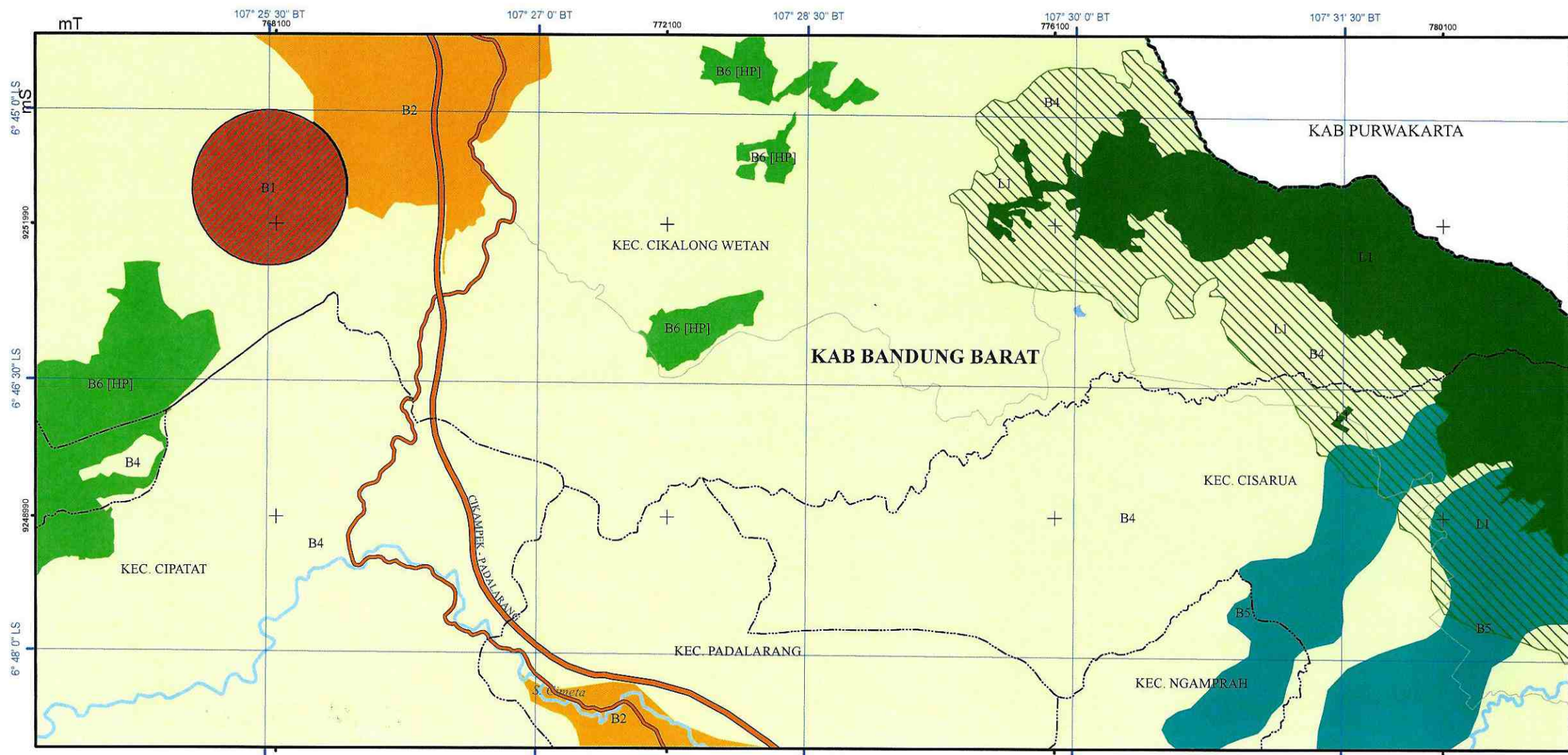


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 22 - 4



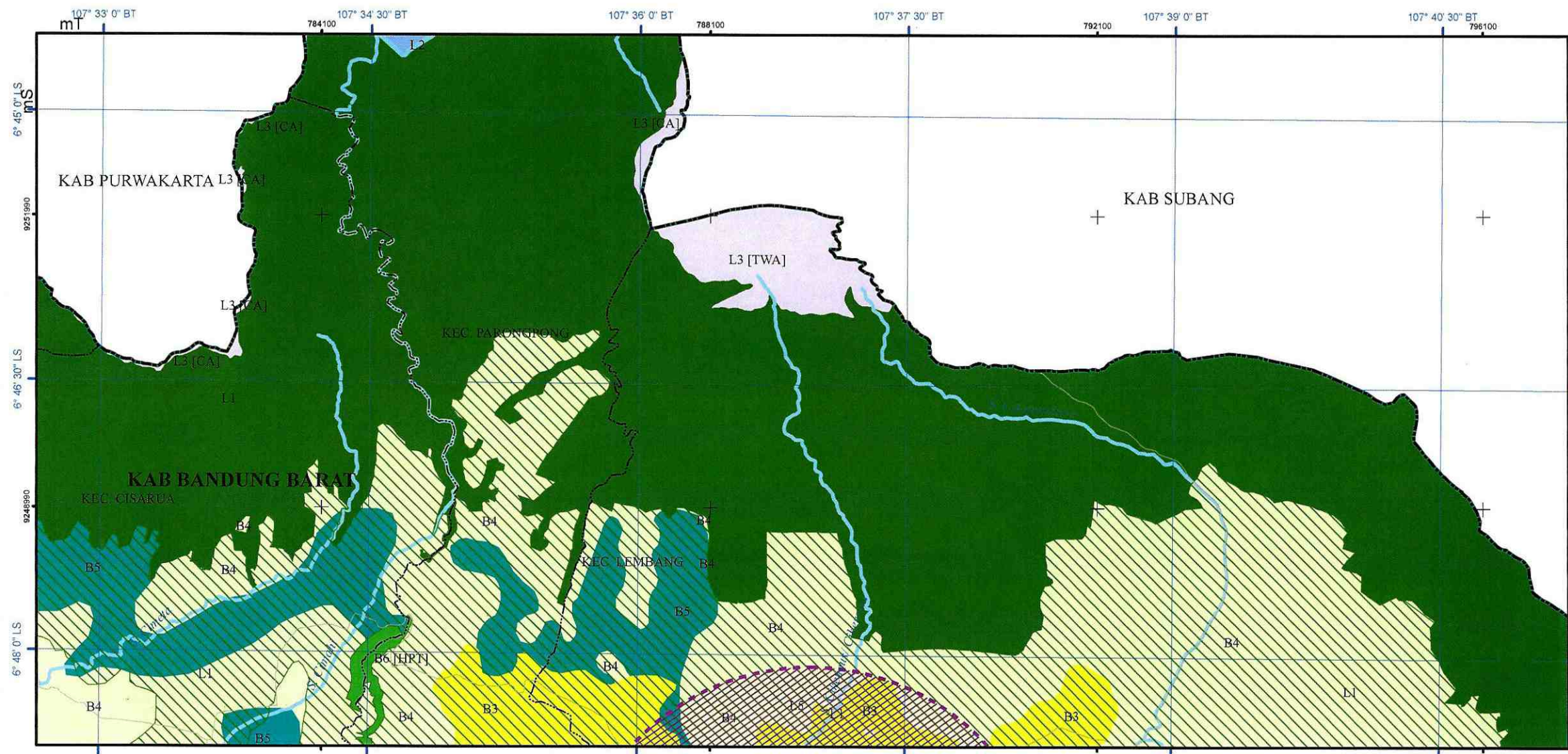


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 23 - 1



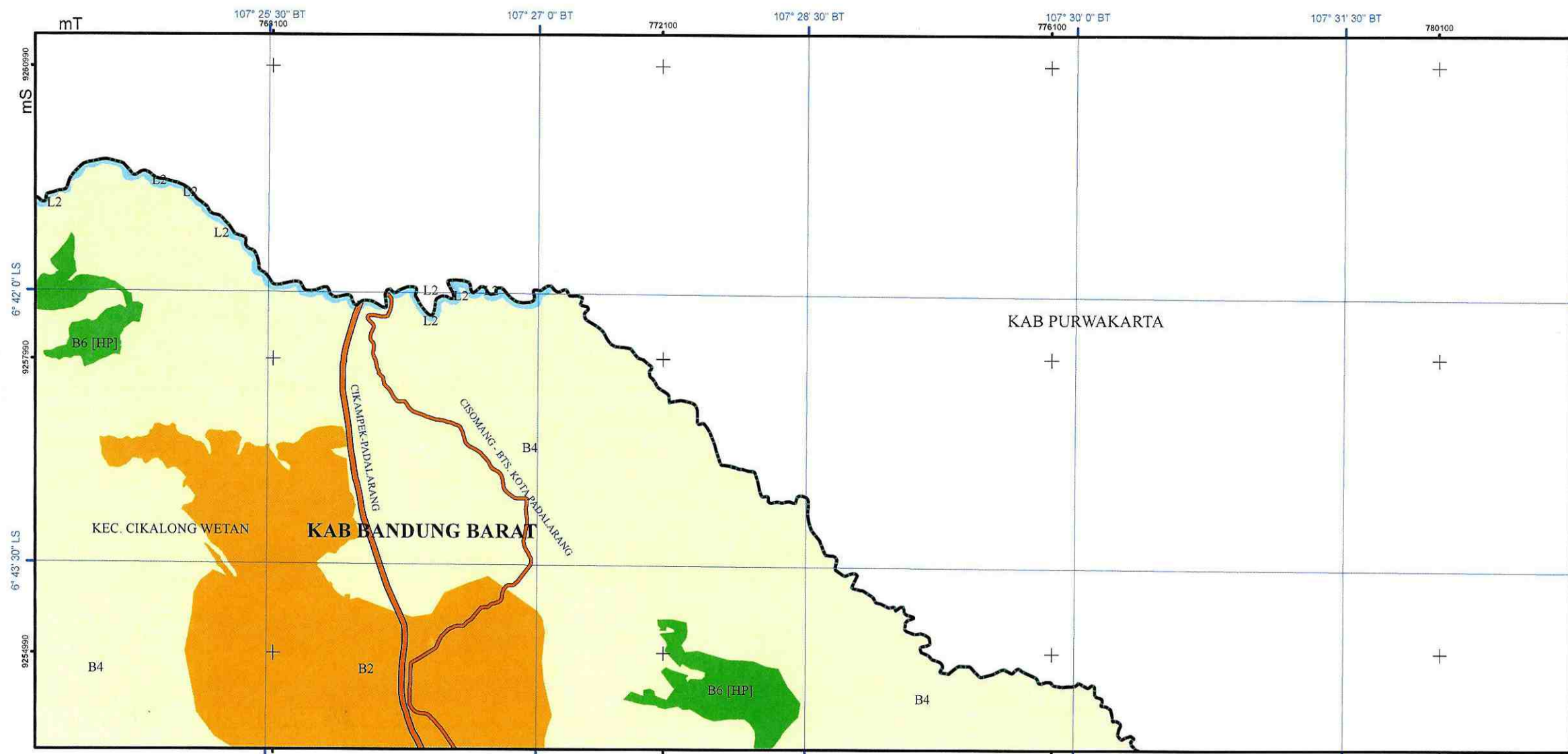


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 23 - 2



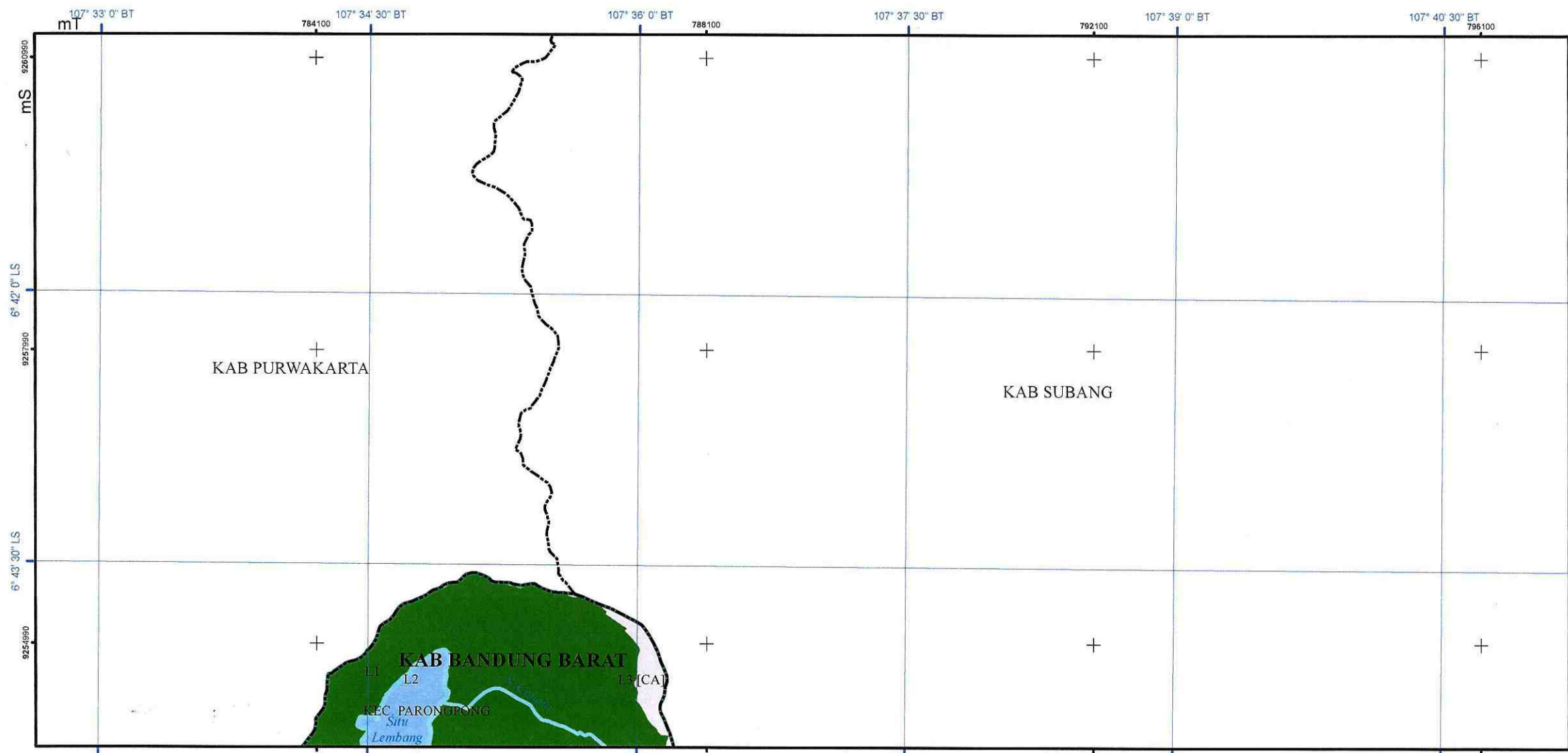


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 23 - 3



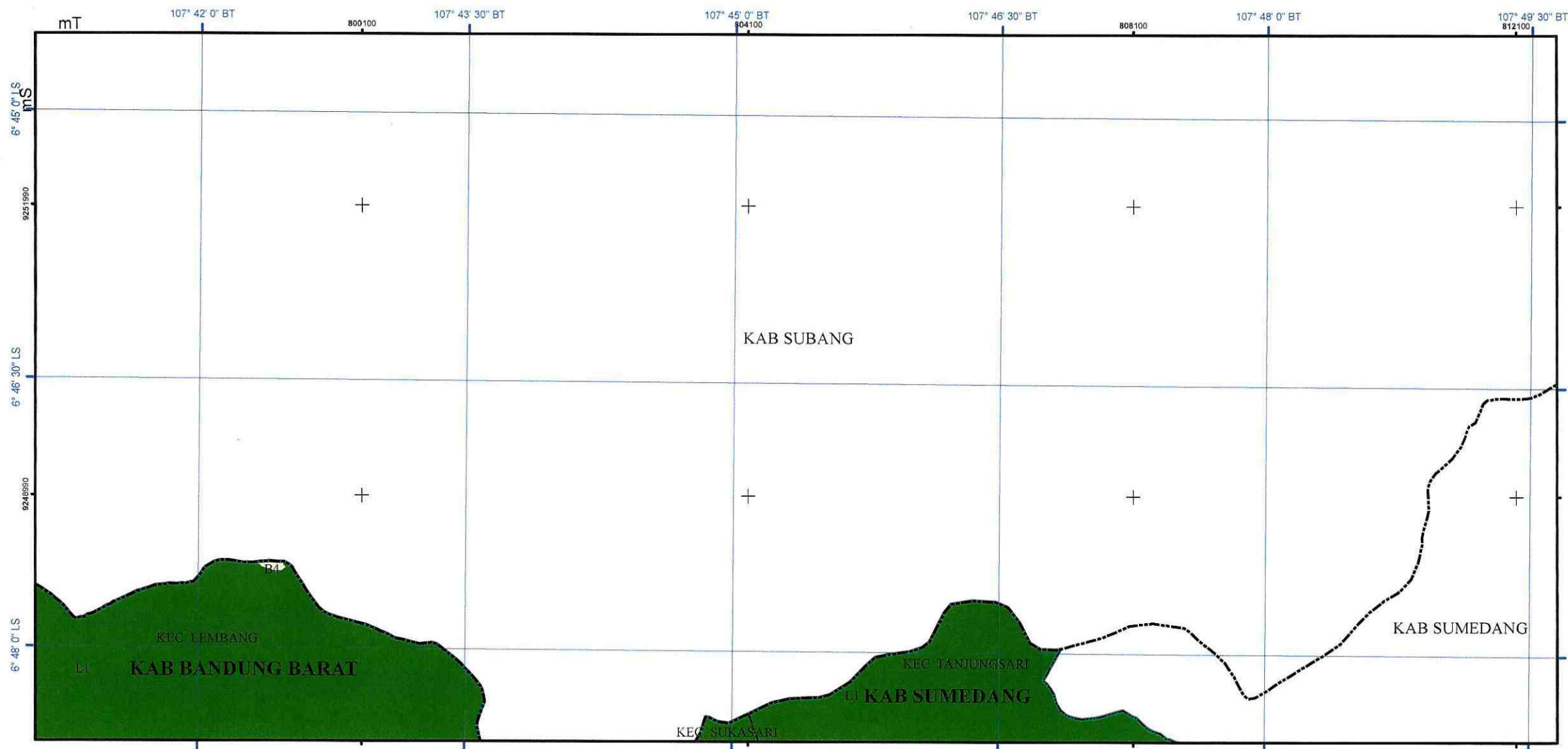


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 23 - 4



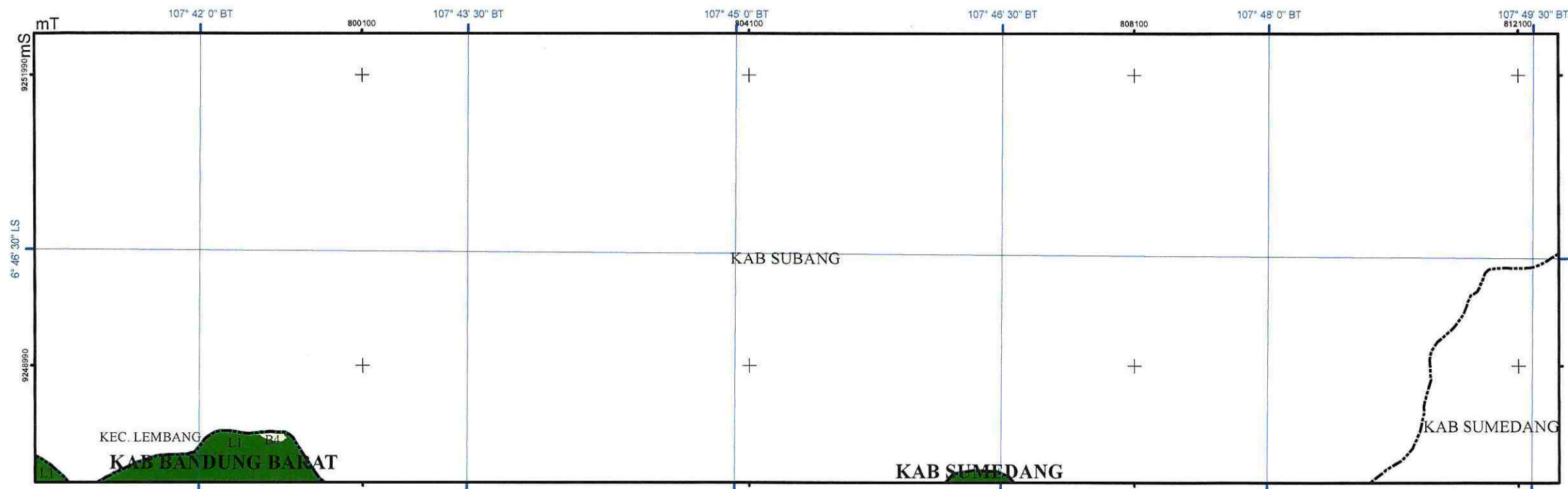


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 24 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 69 - 3 - 24 - 1



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Agustina Murbaringsih